



# **LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2023**

**DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2023.

Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2022 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang investasi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi ke depan.

Jakarta, April 2023

**Direktur Usaha dan Investasi**



**Catur Sarwanto**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2023 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP selama periode triwulan I Tahun 2023, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan nilai investasi dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Usaha dan Investasi yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Usaha dan Investasi dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja.

Secara garis besar, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan mendatang, antara lain:

1. Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, koordinasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan antara pusat, daerah, dan instansi lintas sektoral perlu dilakukan secara intensif agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan. Metode pelaksanaan kegiatan perlu beradaptasi dengan kondisi pasca pandemi Covid-19, dengan memaksimalkan pertemuan secara daring *ataupun hybrid* dan memperhatikan protokol kesehatan.

2. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah maupun pelaku usaha/swasta untuk melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan pemanfaatan pekerjaan secara periodik, serta monitoring dan evaluasi.
3. Harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah perlu terus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha maupun calon investor.
4. Sinergi dalam pelaksanaan kegiatan antar unit kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi meupun dengan Direktorat lingkup Ditjen PDSPKP untuk percepatan pencapaian sasaran dan kinerja organisasi.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Usaha dan Investasi yang telah dicapai selama Tahun 2023, serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing Indikator Kinerja diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, agar kinerja dapat dijalankan lebih baik.

## DAFTAR ISI

|  |   |
|--|---|
| KATA PENGANTAR.....  | i   |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....   | ii  |
| DAFTAR TABEL.....  | vi  |
| DAFTAR GAMBAR.....   | viii  |
| BAB I. PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 1   |
| 1.2. Maksud dan Tujuan .....   | 2   |
| 1.3. Tugas dan Fungsi .....  | 2   |
| 1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia.....   | 4   |
| 1.5. Permasalahan Utama .....  | 6   |
| 1.6. Sistematika Penyajian.....  | 7   |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....   | 9   |
| 2.1. Rencana Strategis .....   | 9   |
| 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....  | 16  |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....   | 19  |
| 3.1. Capaian Kinerja .....   | 19  |
| 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....  | 20  |
| 3.2.1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan.....     | 22  |
| 3.2.2. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Peluang Investasi Yang <i>Ready to Offer</i> <b>Error!</b><br><b>Bookmark not defined.</b> |   |
| 3.2.3. Sasaran Strategis 3: Terlaksananya promosi udaha dan investasi .....  | <b>Error!</b><br><b>Bookmark not defined.</b> |
| 3.2.4. Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.....                              | 31  |
| 3.2.5. Sasaran Strategis 5: Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan.....                       | 34  |
| 3.2.6. Sasaran Strategis 6: Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha .....   | 37  |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.2.7. Sasaran Strategis 7: Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.....                                 | 51        |
| 3.2.8. Sasaran Strategis 8: Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya lingkup Direktorat Usaha dan Investasi .... | 52        |
| <b>BAB IV. PENUTUP .....</b>  | <b>61</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....   | 61        |
| 4.2. Tindak Lanjut .....  | 61        |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

## DAFTAR TABEL

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1  | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Usaha dan Investasi.....   | 17 |
| Tabel 3.1  | Capaian Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023.....   | 20 |
| Tabel 3.2  | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan I Tahun 2023.....            | 23 |
| Tabel 3.3  | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan I Tahun 2023..... | 24 |
| Tabel 3.4  | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan I 2023.....   | 28 |
| Tabel 3.5  | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Institusi Yang Difasilitasi Perizinan Usaha Pengolahan Triwulan I 2023.....   | 31 |
| Tabel 3.6  | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan I 2023.....   | 35 |
| Tabel 3.7  | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Triwulan I 2023.....                            | 36 |
| Tabel 3.8  | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan I Tahun 2023.....   | 38 |
| Tabel 3.9  | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program Triwulan I Tahun 2023.....                            | 40 |
| Tabel 3.10 | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM yang difasilitasi melalui gerai investasi dan layanan usaha (GISELA) pada Triwulan I Tahun 2023.....                           | 44 |
| Tabel 3.11 | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan I tahun 2023.....                  | 46 |
| Tabel 3.12 | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja <i>Startup</i> Milenial yang Difasilitasi dalam rangka Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi.....                                     | 50 |
| Tabel 3.13 | Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023..... | 52 |
| Tabel 3.14 | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023.....   | 52 |
| Tabel 3.15 | Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023.....  | 53 |

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Tabel 3.16 | Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan I Tahun 2023.....   | 54 |
| Tabel 3.17 | Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023.....  | 55 |
| Tabel 3.18 | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023.....       | 56 |
| Tabel 3.19 | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan I Tahun 2023..... | 58 |
| Tabel 3.20 | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023.....   | 59 |
| Tabel 3.21 | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023.....   | 59 |
| Tabel 3.22 | Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023.....   | 60 |



## DAFTAR GAMBAR

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Gambar 1.1  | Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang) .....   | 4  |
| Gambar 1.2  | Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan .....  | 5  |
| Gambar 1.3  | Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin .....  | 5  |
| Gambar 1.4  | Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan .....   | 6  |
| Gambar 3.1  | Dashboard Nilai NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan<br>I Tahun 2023 .....  | 19 |
| Gambar 3.2  | Pertemuan Penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan<br>yang merealisasikan investasi .....   | 23 |
| Gambar 3.3  | Pertemuan Penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan<br>yang merealisasikan pembiayaan kredit program .....                           | 24 |
| Gambar 3.4  | Identifikasi dan koordinasi lokus pemetaan potensi dan peluang<br>investasi di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah .....                | 25 |
| Gambar 3.5  | Koordinasi rencana pembangunan Kampung Nelayan Maju di Pancer,<br>Banyuwangi.....   | 27 |
| Gambar 3.6  | Dokumentasi Kegiatan Promosi Peluang Investasi usaha Kelautan dan<br>Perikanan .....  | 29 |
| Gambar 3.7  | Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan<br>Perikanan.....  | 32 |
| Gambar 3.8  | Kegiatan Penerbitan Sertifikat Standar .....  | 33 |
| Gambar 3.9  | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha di Tarakan  | 31 |
| Gambar 3.10 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Calon Wirausaha,<br>Wirausaha dan Tenaga Kerja di Kabupaten Probolinggo dan<br>Rembang..... | 39 |
| Gambar 3.11 | Kegiatan Penjaringan Minat dan Identifikasi Kebutuhan Usaha di Kota<br>Sukabumi, Bogor dan Tangerang Selatan .....                          | 39 |
| Gambar 3.12 | Identifikasi Potensi Pembiayaan di Kab Rembang.....   | 42 |
| Gambar 3.13 | Identifikasi Potensi Pembiayaan di Kab.<br>Kulonprogo.....  | 42 |

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Gambar 3.14 | Identifikasi Potensi Pembiayaan di Kab Banyumas dan Pemalang.....                                     | 43 |
| Gambar 3.15 | Kegiatan Gerai Investasi dan Layanan Usaha secara <i>Online</i> dan <i>Offline</i> .....              | 46 |
| Gambar 3.16 | kegiatan Fasilitasi sertifikat produksi pangan UKM Pengolahan Hasil Perikanan .....                   | 48 |
| Gambar 3.17 | Kegiatan Rapat Penyusunan usulan revisi peraturan menteri.....  | 48 |
| Gambar 3.18 | Kegiatan Fasilitasi Startup Perikanan dalam rangka pengembangan kampung budidaya patin di Sragen..... | 51 |
| Gambar 3.19 | Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 6 Januari 2023 .....  | 56 |



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat

sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2023.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2023 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

## 1.3. Tugas dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi agar terwujud organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, dan adanya persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1136/M.KT.01/2020, tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 25 September 2020, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Usaha dan Investasi;
- c. Direktorat Logistik;
- d. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; dan
- e. Direktorat Pemasaran.

Selanjutnya dalam Pasal 99 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Usaha dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan keberlanjutan usaha dan investasi meliputi pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan.

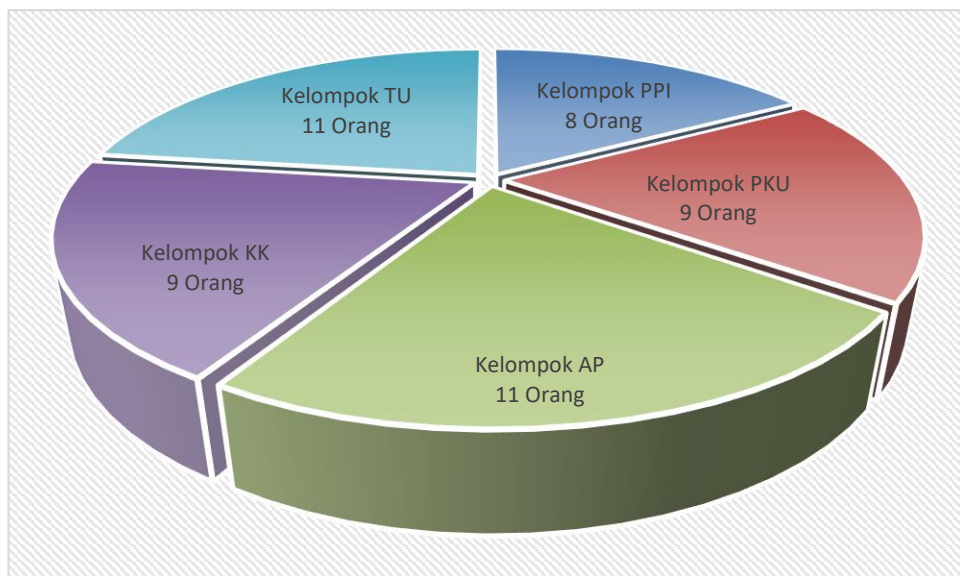
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Usaha dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, akses permodalan, serta kewirausahaan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

#### 1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

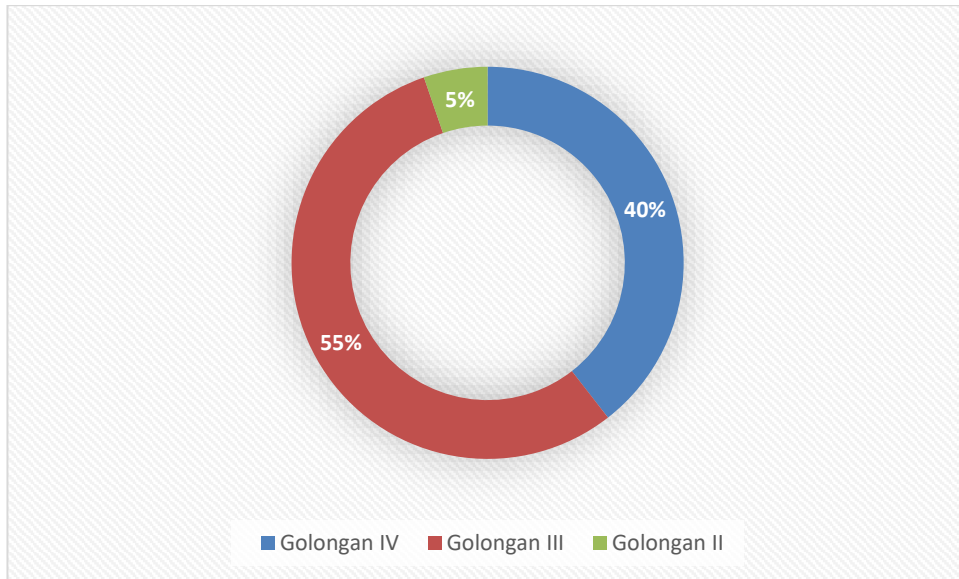
Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 berjumlah 49 orang, yang terdiri dari 38 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN) dan 11 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), yang tersebar di 4 Kelompok dan Kelompok Tata Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, meliputi Direktur sebanyak 1 orang, Kelompok Pemetaan dan Peluang Investasi (PPI) sebanyak 8 orang; Kelompok Pelayanan dan Kemitraan Usaha (PKU) sebanyak 9 orang; Kelompok Akses Permodalan (AP) sebanyak 11 orang; Kelompok Kewirausahaan dan Kelembagaan (KK) sebanyak 9 orang; dan Kelompok Tata Usaha sebanyak 11 orang.



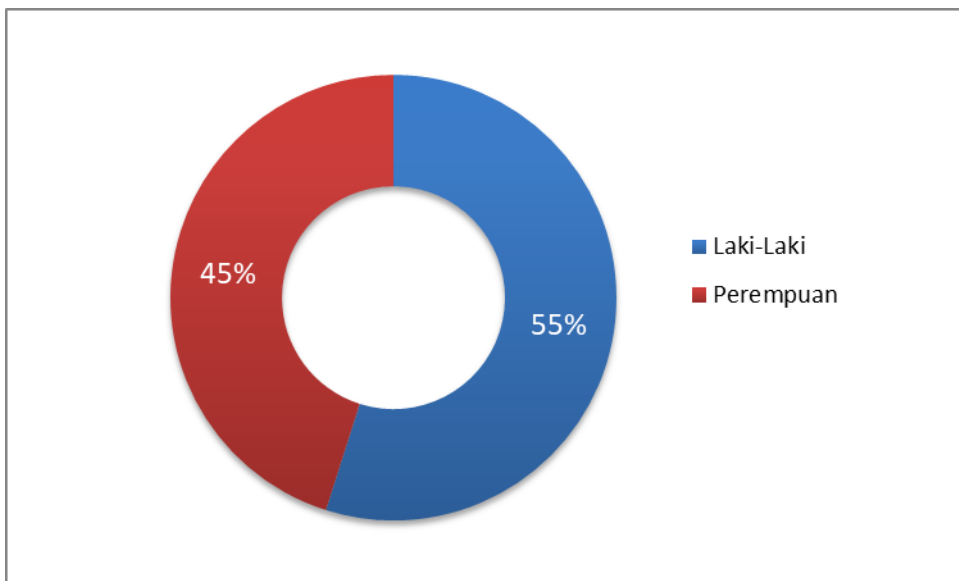
Gambar 1.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang)

2. Jumlah pegawai menurut golongan khusus ASN, meliputi golongan IV sebanyak 15 orang, golongan III sebanyak 21 orang, dan golongan II sebanyak 2 orang. Menurut golongannya, pegawai Direktorat Usaha dan Investasi terbanyak pada golongan III, yakni 55%.



Gambar 1.2. Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan

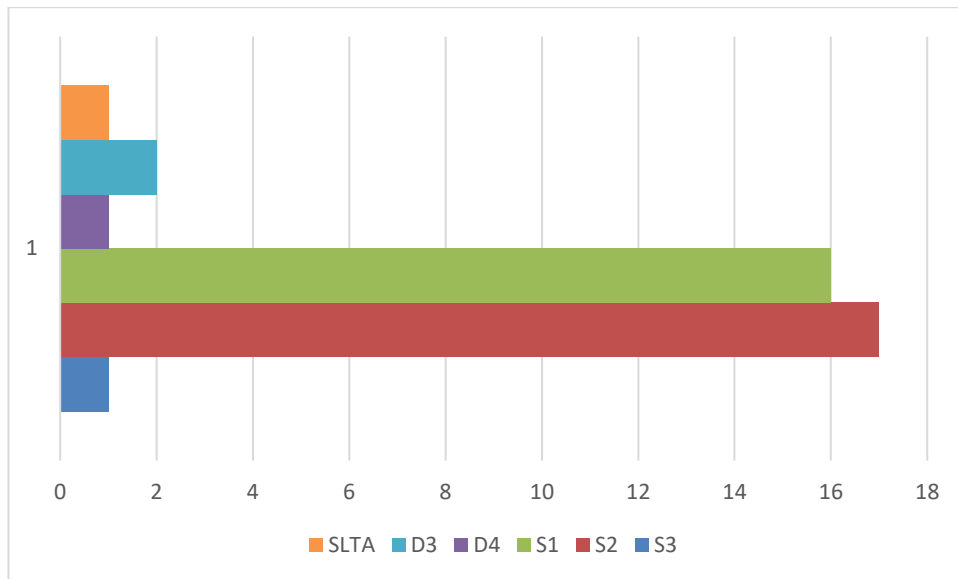
3. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, meliputi laki-laki sebanyak 28 orang, atau 55% dari total pegawai Direktorat Usaha dan Investasi, dan perempuan sebanyak 21 orang, atau 45% dari total pegawai Direktorat Usaha dan Investasi.



Gambar 1.3. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

4. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, meliputi S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 16 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 2 orang, dan SLTA sebanyak 1 orang. Menurut tingkat pendidikannya, pegawai Direktorat Usaha dan Investasi terbanyak dengan tingkat pendidikan S2, yakni mencapai 45%.





Gambar 1.4. Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan

### 1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan hilirisasi industri melalui upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk mengimbangi permintaan masyarakat dunia yang terus meningkat terhadap produk ikan yang bermutu dan aman dikonsumsi.

Dari sisi pemanfaatan potensi sumberdaya, berbagai upaya untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain, kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro-kecil dan usaha menengah-besar, dan akses terhadap sumberdaya (modal, teknologi, sarpras, tenaga kerja) juga perlu mendapatkan perhatian. Pasca pandemi Covid-19 juga masih berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini turut mempengaruhi laju pertumbuhan investasi dan pembiayaan, utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, agar kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Penyediaan informasi peluang investasi usaha di sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan (*ready to offer*).
2. Pelayanan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
3. Penguatan korporasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam kerangka *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
4. Fasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan literasi utamanya tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

#### 1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2023, termasuk didalamnya capaian kinerja pada Triwulan I 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan I Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Usaha dan Investasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Usaha dan Investasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Usaha dan Investasi;

3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Usaha dan Investasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Usaha dan Investasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Usaha dan Investasi untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran.**

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi mengindikasikan pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEP-DJPDSPPK/2021. Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 tersebut disusun sebagai tindak lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

#### 2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi dan permasalahan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk pembangunan nasional 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah "terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong". Visi tersebut tidak lain merupakan Visi Presiden tahun 2020-2024 yang juga diacu sebagai Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**"terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong".**

#### 2.1.2 Misi

Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah menjalankan Misi Presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai misi pembangunan kelautan dan perikanan tahun

2020-2024 serta mendukung 5 (lima) Program Utama Presiden yang disampaikan dalam Pidato Pelantikan tanggal 9 Oktober 2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, dan Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Dari 4 (empat) Misi Presiden yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dapat mendukung 2 (dua) misi yaitu: **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing serta Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.**

### 2.1.3 Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, Ditjen PDSPKP merumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:
  - a. meningkatnya investasi kelautan dan perikanan  
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai investasi kelautan dan perikanan dari Rp5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
  - b. meningkatnya pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program  
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024;
  - c. meningkatnya nilai kinerja logistik hasil perikanan  
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai kinerja logistik hasil perikanan dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
  - d. meningkatnya volume produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan volume produk olahan kelautan dan perikanan dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024;

e. meningkatnya konsumsi ikan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan konsumsi ikan dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024;

f. meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024.

2. Melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP, dengan tujuan:

a. meningkatnya nilai PM PRB Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai PM PRB Ditjen PDSPKP dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;

b. meningkatnya nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai IKPA Ditjen PDSPKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

#### 2.1.4 Sasaran

Sasaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan program pengelolaan perikanan dan kelautan, program nilai tambah dan daya saing industri, serta program dukungan manajemen.

Adapun sasaran tersebut adalah:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

a. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai investasi kelautan dan perikanan meningkat dari Rp 5,21 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp6,43 Triliun pada tahun 2024;
- 2) Kinerja logistik hasil perikanan meningkat dari 52,00 pada tahun 2020 menjadi 60,00 pada tahun 2024;
- 3) Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program meningkat dari Rp3,00 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,20 Triliun pada tahun 2024.

b. Sasaran: Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PDSPKP meningkat 4 (skala 1-5) pada tahun 2020 menjadi 5 (skala 1-5) pada tahun 2024.

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

a. Sasaran: Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing meningkat dari 6,90 Juta Ton pada tahun 2020 menjadi 7,50 Juta Ton pada tahun 2024.

b. Sasaran: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Nilai ekspor hasil perikanan meningkat dari USD6,17 Miliar pada tahun 2020 menjadi USD8,00 Miliar pada tahun 2024;
- 2) Konsumsi ikan meningkat dari 56,39 Kg/Kapita pada tahun 2020 menjadi 62,05 Kg/Kapita pada tahun 2024.

c. Sasaran: Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) meningkat dari 103,75 pada tahun 2020 menjadi 104,75 pada tahun 2024.

### 3. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PDSPKP.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024;
- 2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 82% pada tahun 2020 menjadi 86% pada tahun 2024;
- 3) Level maturitas SPIP Ditjen PDSPKP berada pada level 3 setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 4) Nilai kinerja PM PRB Ditjen PDSPKP meningkat dari 30 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2024;
- 5) Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP meningkat dari A (84) pada tahun 2020 menjadi A (84,75) pada tahun 2024;
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 7) Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP sebanyak 2 unit setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 8) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Baik (92) pada tahun 2024;
- 9) Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP sebesar 1% setiap tahunnya pada tahun 2020-2024;
- 10) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas strategis lingkup Ditjen PDSPKP meningkat dari 70% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- 11) Batas tertinggi prosentasi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP bernilai 1 (satu) setiap tahunnya pada tahun 2020- 2024.



### 2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan KKP ke-3 yaitu membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan, Ditjen PDSPKP menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program
3. Meningkatkan kinerja logistik hasil perikanan
4. Meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing
5. Meningkatkan konsumsi ikan
6. Meningkatkan ekspor hasil perikanan

Dalam melaksanakan 6 (enam) arah kebijakan di atas, Ditjen PDSPKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Di samping itu, Ditjen PDSPKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Adapun strategi pelaksanaan untuk kebijakan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Usaha dan Investasi adalah:

1. Arah kebijakan “meningkatkan investasi kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
  - a. promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan. Langkah operasional untuk mendukung strategi ini adalah terlaksananya promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan.
  - b. Tersedianya peluang investasi yang *Ready to Offer*. Strategi ini dilakukan melalui langkah-langkah operasional sebagai berikut:
    - 1) Identifikasi peluang usaha dan investasi dan
    - 2) penyusunan profil peluang investasi.
  - c. Klaster Daya Saing kelautan dan perikanan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya. Klaster Daya Saing produk kelautan dan perikanan

merupakan tempat pemusatan kegiatan industri perikanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan sehingga menghasilkan produk perikanan yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Langkah operasional untuk mendukung strategi peningkatan kapasitas Klaster Daya Saing ini adalah:

- 1) Pembentukan Lembaga Klaster Daya Saing KP; dan
  - 2) Pengembangan Lembaga Klaster Daya Saing KP;
- d. Pemantuan dan pengendalian investasi. Strategi pemantuan dan pengendalian ini ditujukan untuk percepatan realisasi investasi melalui:
- 1) Pemantuan rencana dan realisasi serta tren investasi; dan
  - 2) Pengendalian investasi bila terjadi kendala dalam realisasi investasi.
- Dalam pemantuan dan pengendalian ini, perlu dibangun koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait lainnya.
2. Arah kebijakan “meningkatkan pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. Fasilitasi kemitraan usaha. Strategi ini dilakukan dengan cara mengembangkan kemitraan usaha, serta fasilitasi pelaku usaha untuk mengakses CSR/PKBL. Langkah-langkah pengembangan pengembangan kemitraan:
    - 1) Identifikasi pelaku dan permasalahannya;
    - 2) Fasilitasi kemitraan usaha; dan
    - 3) Pendampingan dan monitoring.
  - b. Fasilitasi akses pembiayaan. Kendala utama pembiayaan usaha kelautan dan perikanan diantaranya yaitu: (1) adanya gap informasi pembiayaan, akibat kurangnya informasi akses pembiayaan di sisi pelaku usaha, dan minimnya informasi calon debitur potensial di sisi lembaga pembiayaan; dan (2) Rendahnya literasi keuangan, dimana sebagian besar pelaku usaha kelautan perikanan memiliki literasi keuangan yang rendah. Langkah operasional fasilitasi akses pembiayaan meliputi:
    - 1) penjaringan calon debitur potensial,
    - 2) peningkatan kelayakan usaha,
    - 3) sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan,

- 4) pendampingan manajemen usaha,
  - 5) peningkatan literasi keuangan, dan
  - 6) pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*).
- c. Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA). Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
- 1) Rapat kerja teknis tenaga pendamping usaha; dan
  - 2) Pembinaan tenaga pendamping usaha .
- c. Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan. Strategi ini dilakukan dengan langkah-langkah:
- 1) Penumbuhan wirausaha baru dan pendampingan wirausaha;
  - 2) Pembentukan dan penguatan inkubator bisnis; dan
  - 3) Penguatan kelembagaan kelompok menjadi koperasi.
- d. Fasilitasi digitalisasi usaha. Secara prinsip, digitalisasi usaha adalah mengubah pola komunikasi, interaksi, dan fungsi-fungsi yang ada dalam usaha menjadi digital. Hal ini bersinergi dengan perizinan online karena menumbuhkan bakat dan minat pelaku usaha untuk berinteraksi secara online. Digitalisasi ini mendukung misi Presiden terkait struktur ekonomi produktif dan berdaya saing menyongsong Revolusi Industri 4.0. Manfaat digitalisasi usaha adalah kerja lebih cepat, efektif, tenaga kerja sedikit, dan jangkauan pelanggan lebih luas.
- Langkah-langkah untuk mendorong digitalisasi usaha bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah:
- 1) pembinaan pemanfaatan teknologi digitalnya;
  - 2) membangkitkan ketertarikan bermedia sosial yang sehat;
  - 3) bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi bisnis yang ada;
  - 4) fasilitasi penyiapan desain website yang menarik (*mobile friendly*);
  - 5) inovasi produk selalu diperhatikan;
  - 6) pembinaan cara berinteraksi dan memberi pelayanan di media sosial;
  - 7) responsif terhadap keluhan pelanggan

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2023.

Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Perjanjian Kinerja pada Triwulan I mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru tentang penetapan indikator kinerja pada setiap level. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Usaha dan Investasi**

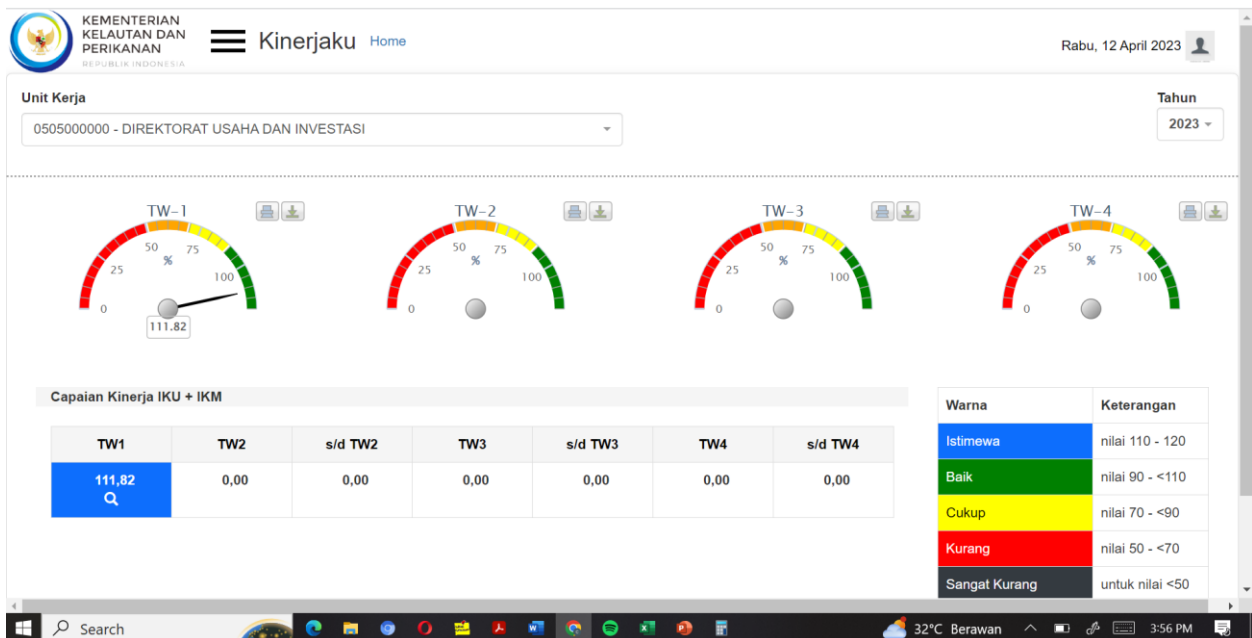
| SASARAN STRATEGIS |  | INDIKATOR KINERJA |   | TARGET |
|-------------------|--|-------------------|---|--------|
| 1                 | Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan                        | 1                 | Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)  | 5      |
|                   |  | 2                 | Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)                              | 8      |
| 2                 | Tersedianya peluang investasi yang ready to offer  | 3                 | Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)   | 4      |
| 3                 | Terlaksananya promosi usaha dan investasi  | 4                 | Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)  | 3      |
| 4                 | Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan                            | 5                 | Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan (Layanan)   | 1      |
| 5                 | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan  | 6                 | Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)   | 35     |
|                   |  | 7                 | Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)   | 3      |
| 6                 | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha   | 8                 | Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)  | 585    |
|                   |  | 9                 | UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program (UMKM)  | 500    |
|                   |  | 10                | UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) (UMKM)  | 2.135  |
|                   |  | 11                | UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)   | 84     |
|                   |  | 12                | Startup milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi (UMKM)  | 8      |
| 7                 | Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan                                 | 13                | Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (orang)                                  | 4.794  |
| 8                 | Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Usaha dan Investasi | 14                | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)                  | 75     |
|                   |  | 15                | Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)  | 83,2   |
|                   |  | 16                | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)  | 80,5   |
|                   |  | 17                | Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)                            | ≤5     |
|                   |  | 18                | Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%) | 75     |

| SASARAN STRATEGIS |  | INDIKATOR KINERJA |   | TARGET |
|-------------------|--|-------------------|---|--------|
|                   |  | 19                | Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)                                   | 1      |
|                   |  | 20                | Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) | 92     |
|                   |  | 21                | Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)  | 95     |
|                   |  | 22                | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)  | 77,5   |
|                   |  | 23                | Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)  | 77,5   |

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja seluruh level lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023 pada SAPK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1. Dashboard Nilai NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023 sebesar 111,82%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan NPSS Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan I tahun 2022 sebesar 99,13% dan capaian triwulan I tahun 2021 sebesar 110,12%.

Direktorat Usaha dan Investasi pada Tahun 2023 menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan I Tahun 2023, terdiri atas 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi  
Triwulan I Tahun 2023**

| No | Sasaran Strategis (SS)  | Indikator Kinerja (IK)  | Target |      | Realisasi    |                   |                   |
|----|---|---|--------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|    |   |   | 2023   | TW I | Capaian TW I | % thd Target TW I | % thd Target 2023 |
| 1  | Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan | 1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)                 | 5      | -    | -            | -                 | -                 |
|    |   | 2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%) | 8      | -    | -            | -                 | -                 |
| 2  | Tersedianya peluang investasi yang ready to offer   | 3. Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)  | 4      | -    | -            | -                 | -                 |
| 3  | Terlaksananya promosi usaha dan investasi   | 4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)   | 3      | -    | 1            | 100               | 33,33             |
| 4  | Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan     | 5. Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan (Layanan)                        | 1      | -    | -            | -                 | -                 |
| 5  | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan                   | 6. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)                                | 35     | 4    | 4            | 100               | 11,43             |
|    |   | 7. Lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)                | 3      | -    | -            | -                 | -                 |
| 6  | Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha  | 8. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)                                     | 585    | 80   | 80           | 100               | 13,68             |
|    |   | 9. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program (UMKM)                         | 500    | 50   | 54           | 108               | 10,80             |
|    |   | 10. UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) (UMKM)                            | 2.135  | 100  | 108          | 108               | 5,06              |

| No | Sasaran Strategis (SS)   | Indikator Kinerja (IK)  | Target |      | Realisasi    |                   |                   |
|----|--|---|--------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|    |  |   | 2023   | TW I | Capaian TW I | % thd Target TW I | % thd Target 2023 |
|    |  | 11. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)   | 84     | 15   | 15           | 100               | 17,86             |
|    |  | 12. Startup milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi (UMKM)  | 8      | -    | 1            | 100               | 17,86             |
| 7  | Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan                                 | 13. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (orang)                                  | 4794   | -    | -            | -                 | -                 |
| 8  | Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Usaha dan Investasi | 14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)                  | 75     | -    | -            | -                 | -                 |
|    |  | 15. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)  | 83,2   | -    | -            | -                 | -                 |
|    |  | 16. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)  | 80,5   | -    | -            | -                 | -                 |
|    |  | 17. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)                            | ≤5     | -    | -            | -                 | -                 |
|    |  | 18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%) | 75     | 75   | 100          | 133,33            | 133,33            |
|    |  | 19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)   | 1      | -    | -            | -                 | -                 |
|    |  | 20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)       | 92     | 92   | 100          | 108,7             | 108,7             |
|    |  | 21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)  | 95     | -    | -            | -                 | -                 |
|    |  | 22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)  | 77,5   | -    | -            | -                 | -                 |



| No | Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja (IK)   | Target |      | Realisasi    |                   |                   |
|----|------------------------|--|--------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|    |                        |  | 2023   | TW I | Capaian TW I | % thd Target TW I | % thd Target 2023 |
|    |                        | 23. Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%) | 77,5   | -    | -            | -                 | -                 |

### 3.2.1. Sasaran Strategis 1

**Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan**

#### **IK1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi**

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) selalu berupaya untuk mendorong peningkatan realisasi investasi melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur. Selain itu untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Nilai persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi termasuk dalam *outcome* yang harus dicapai Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 5%. Nilai tersebut diperoleh dari persentase selisih pelaku usaha yang melakukan investasi pada tahun sebelumnya dengan tahun ini. Capaian tersebut belum dapat dihitung pada Triwulan I, hal ini dikarenakan penilaian terhadap persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi baru dilakukan pada akhir tahun.

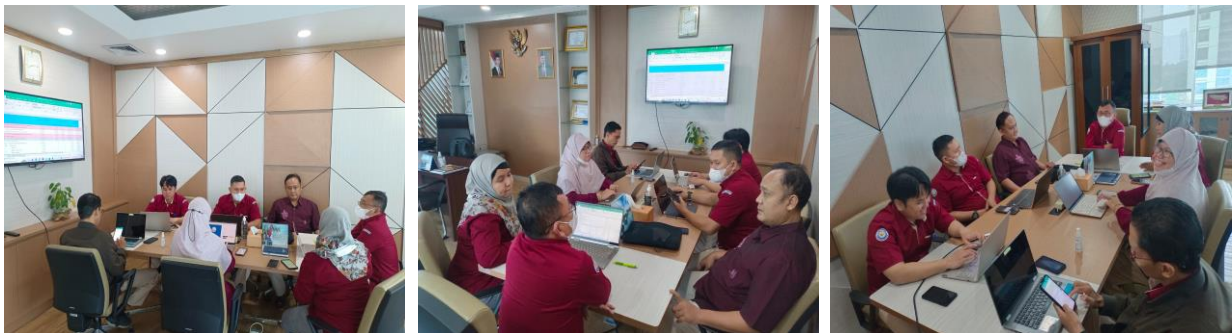
Untuk mencapai nilai tersebut Direktorat Usaha dan Investasi melaksanakan pertemuan dalam rangka penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang

merealisasikan investasi sebanyak 1 kali pada triwulan I pada tanggal 28 Maret 2023 di ruang Direktur Usaha dan Investasi.

**Tabel 3.2 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada Triwulan I Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      | REALISASI    |                   |                   |
|----|--|--------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|    |  | 2023   | TW I | Capaian TW I | % thd Target TW I | % thd Target 2023 |
| 1  | Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%) | 5      | -    | -            | -                 | -                 |

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Koordinator Kelompok lingkup Direktorat Usaha dan Investasi dan Kasubbag Tata Usaha Direktorat Usaha dan Investasi untuk menghitung capaian jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi pada periode berjalan.



Gambar 3.2 Pertemuan Penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi

**IK2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program**

Indikator kinerja ini menunjukkan persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), dan skema pembiayaan kredit program lainnya, yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank kepada UMKM hasil kelautan dan perikanan.

Peningkatan pelaku Usaha KP yang mendapatkan kredit program periode tahun 2023 adalah akumulasi pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan kredit program periode bulan Januari-Desember 2023. Adapun metode penghitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung realisasi pertumbuhan debitur (kredit program) pada periode tahun berjalan dengan periode tahun sebelumnya (*year on year*). Target

yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebesar 8%. Capaian kinerja ini belum dapat dihitung pada Triwulan I, hal ini dikarenakan penilaian terhadap persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program baru dilakukan pada akhir tahun.

**Tabel 3.3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program Triwulan I Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      | REALISASI    |                   |                   |
|----|--|--------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|    |  | 2023   | TW I | Capaian TW I | % thd Target TW I | % thd Target 2023 |
| 1  | Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%) | 8      | -    | -            | -                 | -                 |

Untuk mencapai nilai tersebut Direktorat Usaha dan Investasi melaksanakan pertemuan dalam rangka penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan sebanyak 1 kali pada triwulan I pada tanggal 29 Maret 2023 di ruang Direktur Usaha dan Investasi. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh Koordinator Kelompok lingkup Direktorat Usaha dan Investasi dan Kasubbag Tata Usaha Direktorat Usaha dan Investasi untuk menghitung capaian jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program pada periode berjalan.



**Gambar 3.3 Pertemuan Penghitungan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program**

### 3.2.2. Sasaran Strategis 2

#### Tersedianya Peluang Investasi Yang *Ready to Offer*

#### IK3. Peluang investasi Yang *Ready to Offer*

Dokumen peluang investasi yang *ready to offer* merupakan dokumen yang mengangkat potensi daerah dan peluang investasinya berdasarkan komoditas unggulan dan/atau kawasan/lokasi prioritas, dimana dokumen tersebut sudah siap ditawarkan kepada calon investor (*ready to offer*) karena telah dianalisa tingkat kelayakan investasinya, minimal ditinjau dari aspek (i) legalitas; (ii) finansial; (iii) teknis produksi dan operasional; (iv) sosial ekonomi. Kegiatan ini dilakukan melalui tahapan (i) identifikasi lokasi/kawasan potensial; (ii) Koordinasi dan perbahasan konsep kajian; (iii) penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* oleh Tim Konsultan; (iv) FGD pengayaan data dan informasi di daerah, dan (v) pendampingan pelaksanaan pekerjaan.

Capaian kinerja ini belum dapat dihitung pada Triwulan I, hal ini dikarenakan penilaian terhadap penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* baru dilakukan pada akhir tahun. Sampai dengan triwulan I tahun 2023, kegiatan penyusunan dokumen peluang investasi yang *ready to offer* baru dilaksanakan pada tahap pemetaan dan identifikasi awal di beberapa lokus potensial. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp29.207.080,- atau 3,89% dari total anggaran sebesar Rp750.000.000,-.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP antara lain:

1. Identifikasi dan koordinasi lokus pemetaan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Identifikasi dan koordinasi lokus pemetaan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Maret 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan potensi dan peluang investasi di daerah yang akan menjadi lokasi target penyusunan dokumen peluang investasi sektor kelautan dan perikanan.

Hasil koordinasi dengan Kabid Perikanan Budidaya dan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan, diperoleh informasi bahwa Pemkab Kebumen memiliki lahan seluas 314,9 Ha. Dari total luas lahan tersebut, sekitar 30% dapat ditawarkan kepada investor untuk mengembangkan usaha sektor

kelautan dan perikanan. Dari seluruh wilayah tersebut, rekomendasi utama untuk pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI) diarahkan kepada lahan yang terletak di Desa Sidoharjo dan Waluyorejo, Kecamatan Puring.

Hasil survey lapangan diperoleh hasil dan kondisi lahan antara lain (i) lahan milik Pemda dengan status SHM; (ii) lokasi sekitar 0,5 – 1,5 KM dari jalan utama dengan jenis jalan batu dan tanah; (iii) sumber air berasal dari air tanah; (iv) masyarakat mendukung pengembangan usaha perikanan sehingga tidak ada potensi konflik sosial; (v) usulan teknis dari pengelola BUBK agar pembangunan UPI udang dapat dilakukan minimal 2 KM dari BUBK.

Prioritas investasi KP yang diharapkan dapat segera dipenuhi investor yaitu (i) pabrik es; (2) UPI udang bernilai tambah; (iii) cold storage udang; (iv) tambak udang dengan sistem semi intensif dan intensif.



Gambar 3.4 Identifikasi dan koordinasi lokus pemetaan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

2. Koordinasi rencana pembangunan Kampung Nelayan Maju di Pancer, Banyuwangi, serta survey kebutuhan sarana prasarana hilirisasi perikanan

Pemetaan peluang investasi usaha KP di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, bertujuan untuk memetakan potensi dan peluang investasi di Desa Sumberagung yang akan dijadikan Kampung Nelayan Maju (Kalaju). Program Kalaju dirancang untuk pengembangan kawasan terpadu dimana bisnis perikanan dapat dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kalaju akan diarahkan untuk dikelola Koperasi Perikanan/Nelayan. Koperasi tersebut diharapkan dapat mengelola seluruh aset Pemerintah yang akan dibangun dan disediakan di kawasan Kalaju.



Hasil pemetaan di Dusun Pancer terdapat Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pancer yang dikelola oleh UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. PPN Pancer memiliki luas kawasan 5 Ha, dengan status kepemilikan lahan milik Pemprov Jawa Timur. Dari total luas kawasan tersebut, ada lahan kosong seluas 2 Ha dengan status yang *clear & clean* yang siap ditawarkan kepada investor untuk peluang investasi pembangunan cold storage, miniplant pengolahan tuna, pabrik es, dan/atau pasar ikan.

Hasil identifikasi kebutuhan sarana prasarana bidang hilirisasi perikanan yaitu usulan pengadaan kendaraan berpendingin dan pembangunan pasar ikan, dengan syarat dan ketentuan lembaga pengelola telah siap dan status kepemilikan aset jelas. Adapun justifikasi yaitu (i) Lahan clean and clear; (ii) Sudah ada embrio pasar; (iii) Sudah ada lembaga calon pengelola; dan (iv) Ketersediaan air dan listrik cukup layak. Rekomendasi tindak lanjut untuk mempersiapkan pengembangan bidang hilir di Kalaju Pancer antara lain (i) penguatan kelembagaan calon penerima oleh Pemkab Banyuwangi; (ii) koordinasi antara Pemprov Jatim dan Pemkab Banyuwangi terkait pengelolaan dan kepemilikan pasar ikan; (iii) desain bangunan pasar ikan harus direncanakan ramah bencana alam; (iv) kelompok calon pengelola dan DKP Banyuwangi segera mengusulkan proposal bantuan pembangunan pasar ikan dan pengadaan kendaraan berpendingin; (v) direktorat teknis (Ditlog dan Ditsar) melakukan kajian FS lebih detail melibatkan tenaga ahli untuk menjamin operasional sarpras; (vi) kegiatan non fisik yang diperlukan yaitu penumbuhan wirausaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, kemitraan usaha, perluasan akses pasar (terutama untuk poklahsar eksisting), bimtek pengolahan untuk istri nelayan, akses distribusi/logistik ke luar Banyuwangi.



Gambar 3.5 Koordinasi rencana pembangunan Kampung Nelayan Maju di Pancer, Banyuwangi

### 3.2.3. Sasaran Strategis 3

#### Terlaksananya promosi usaha dan investasi

#### IK4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan

Kegiatan promosi usaha dan investasi bertujuan untuk menarik minat investasi di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan perluasan usaha. Tahapan kegiatan meliputi (i) pemetaan data potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan; (ii) promosi peluang investasi usaha kelautan dan perikanan; dan (iii) pendampingan investasi. Kegiatan Fasilitasi Promosi Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk: (i) Mempromosikan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan kepada pelaku usaha/calon investor; (ii) Fasilitasi *Investment matching* antara *G to B* yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota dengan calon investor dan *B to B* antara perusahaan dengan calon investor.

**Tabel 3.4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Promosi Usaha dan Investasi KP Triwulan I 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA                         | TARGET |      | REALISASI |                   |                   |
|----|---|--------|------|-----------|-------------------|-------------------|
|    |   | 2023   | TW I | Capaian   | % thd Target TW I | % thd Target 2023 |
| 4  | Promosi Usaha dan Investasi KP (Kegiatan) | 2      | -    | 1         | 100,00            | 50,00             |

Pencapaian pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 1 kegiatan, dengan persentase 50% dari target tahun 2023. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp459.768.842,- atau 28,09% dari total anggaran sebesar Rp1.636.981.000,-. Kegiatan promosi investasi usaha kelautan dan perikanan yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Promosi Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, Yapen dan Kepulauan Waropen

Ditjen PDSPKP KKP bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, Yapen, dan Waropen menyelenggarakan Promosi Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan pada tanggal 2 Februari 2023 bertempat di Gedung Sarinah, Jakarta. Tujuan kegiatan adalah mempromosikan peluang investasi usaha Kelautan dan perikanan yang *ready to offer* di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, Yapen dan Waropen;

Kegiatan ini menghadirkan Bupati Biak Numfor, Bupati Sarmi, Bupati Yapen, dan Wakil Bupati Kepulauan Waropen yang menawarkan peluang investasi usaha

kelautan dan perikanan di wilayahnya yang siap ditawarkan. Peserta yang hadir pada forum promosi kurang lebih 100 orang meliputi atas: i) Asosiasi; ii) Pelaku usaha perikanan; dan iii) Calon investor potensial;

Output dari kegiatan ini adalah terdapat minat investasi dari PT. Famindo Bahari Indonesia untuk membangun cold storage berkapasitas 2.000 ton di Kabupaten Biak Numfor dan KHK Holding untuk peninjauan investasi di 4 kabupaten.

Tindak lanjut terhadap kegiatan ini adalah (1) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten terpilih untuk menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang sudah menyatakan minat investasi; (2) Melakukan pendampingan investasi kepada PT. Famindo Bahari Indonesia dan KHK agar dapat merealisasikan investasinya.



Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Promosi Peluang Investasi usaha Kelautan dan Perikanan

2. Pendampingan investasi PMA Sektor Kelautan dan Perikanan di Kota Bitung khususnya kawasan ekonomi yaitu KEK Bitung dilaksanakan secara *daring* melalui



zoom pada tanggal 4 Januari 2023 dihadiri oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City, Vietnam, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, Kepala Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Direktur Utama PT. Membangun Sulut Hebat (Badan Usaha Pengelola KEK Bitung), pimpinan Hai Nam Co. Ltd dan perwakilan unit eselon 2 lingkup KKP dan Ditjen PDS. Target outcome yaitu terjadinya realisasi investasi di sektor kelautan dan perikanan di KEK Bitung dan/atau PPS Bitung dari investor dari Vietnam (bersumber dari PMA).

3. Pendampingan investasi Rumput Laut di Kabupaten Wakatobi dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2023 secara *daring* melalui *zoom* dihadiri Bupati Wakatobi, Direktur Perbenihan, DJPB dan Kepala Dinas KP Kabupaten Wakatobi. Peserta terdiri dari Perwakilan ARLI, ASTRULI, ASPPERLI, CBI, Pelaku usaha pengolahan rumput laut, dan Pelaku usaha pemasaran rumput laut. Hasil dari kegiatan ini adalah minat investasi PT. Sea6 Energy dan PT. Sumberguna Makassar di usaha budidaya rumput laut.
4. Pendampingan investasi melalui kegiatan UMKM Kelautan dan Perikanan *Thrive Expo* yang dilaksanakan pada 6 Maret 2023. Hasil dari kegiatan ini adalah layanan perizinan/sertifikasi telah diberikan kepada 141 pelaku UMKM, layanan pembiayaan telah diberikan kepada 61 pelaku UMKM, dan diperoleh total potensi pembiayaan sebesar Rp2,23 Miliar.
5. Pendampingan investasi usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat Provinsi NTB dilaksanakan pada tanggal 6 – 9 Februari 2023. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah (i) investor akan melakukan analisa perhitungan kelayakan investasi, khususnya untuk budidaya rumput laut di Kabupaten Sumbawa; (ii) hasil analisa kelayakan investasi akan didiskusikan kembali bersama Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa; (iii) investor akan mendiskusikan terkait sewa pabrik ATC.
6. Pendampingan investasi usaha pengolahan rumput laut di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Februari 2023 antara PT Kay Jayden Jaya kepada PT Batulicin Algae Persada untuk komoditas rumput laut. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah PT Kay Jayden Jaya dan PT Batulicin Algae Persada akan melakukan pembahasan cashflow dan skema kerjasama.

7. Pendampingan kemitraan investasi usaha pengolahan rumput laut di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 – 15 Februari 2023 kepada investor PT Kay Jayden Jaya yang berminat melakukan peninjauan investasi untuk usaha pengolahan rumput laut.

**3.2.4. Sasaran Strategis 4**

**Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan**

**IK5. Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan**

Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha pengolahan ikan untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya untuk mendapatkan legalitas perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Indikator ini dicapai melalui kegiatan budaya pelayanan prima, penerapan standar pelayanan, penyelesaian hambatan perizinan, pengelolaan pengaduan dan survey kepuasan masyarakat.

Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, karena indikator kinerja ini baru di tahun 2023. Indikator kinerja Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan merupakan indikator baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja ini belum dapat dihitung pada Triwulan I, hal ini dikarenakan penilaian terhadap layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha KP baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

**Tabel 3.5. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Institusi Yang Difasilitasi Perizinan Usaha Pengolahan Triwulan I 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET    |      | REALISASI |                   |                  |
|----|---|-----------|------|-----------|-------------------|------------------|
|    |   | 2023      | TW I | Capaian   | % thdTarget TW IV | % thdTarget 2023 |
| 5  | Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan | 1 layanan | -    | -         | -                 | -                |

Kegiatan Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan pada triwulan I, meliputi:

## 1. Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan

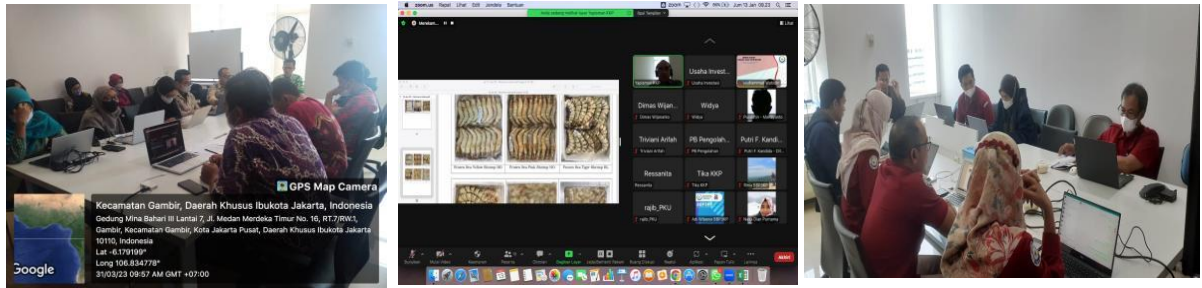
Sosialisasi perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan telah dilaksanakan sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 10 Maret 2023 di Hotel Mercure Bandung City Center, Bandung, Jawa Barat. Acara dibuka oleh Direktur Usaha dan Investasi dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pengawasan Sumberdaya Perikanan, Ditjen PSDKP, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Pemasaran, Kepala Bidang Pengolahan Dinas KP Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, serta pelaku usaha sub sektor pengolahan dan pemasaran di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diharapkan mampu mengajak masyarakat memenuhi legalitas usahanya, agar dapat melanjutkan usaha yang bertanggung jawab dan memenuhi standar keamanan dan jaminan mutu hasil perikanan, serta untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan fasilitas, pembinaan, pelatihan, pendampingan usaha, modal dan pembiayaan, dan dapat naik kelas menjadi pelaku usaha yang mampu memperluas pasarnya menjadi eksportir.



Gambar 3.7 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan

## 2. Penerbitan Sertifikat Standar

Kegiatan verifikasi kelengkapan standar usaha telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kelengkapan komitmen, rencana usaha, dan permohonan penerbitan standar usaha. Pertemuan dihadiri oleh tim verifikasi yang beranggotakan: Pusat Data, Statistik, dan Informasi Setjen, Bagian Hukum Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Logistik, Direktorat Pemasaran, BBP3KP, serta Koordinator Kelompok lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP.



Gambar 3.8 Kegiatan Penerbitan Sertifikat Standar

Adapun Selama periode Januari sampai dengan Maret 2023 telah diterbitkan 10 sertifikat standar kepada pelaku usaha yang bermohon sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan. Daftar sertifikat standar sebagaimana pada lampiran 3.

### 3. Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha

Dalam rangka monitoring dan evaluasi perizinan berusaha telah dilakukan kunjungan lapangan ke 2 (dua) UPI yang telah memiliki sertifikat standar di Tarakan, Kalimantan Utara, yaitu PT. Mustika Minanusa Aurora dan PT. Mitra Kartika Sejati. PT. Mustika Minanusa Aurora telah memiliki KBLI 10293 (industri pembekuan biota air lainnya) dengan produk berupa *frozen raw shrimp*, *frozen cook shrimp*, dan *frozen cook crab*. UPI ini sedang dalam melakukan proses penambahan KBLI 10213, tetapi masih ada kendala di PKKPR. Sedangkan PT. Mitra Kartika Sejati memiliki KBLI 10293 (industri pembekuan biota air lainnya) dengan produk berupa udang beku, tapi sampai sekarang belum operasional karena mesin-mesinya belum diinstalasi.



Gambar 3.9 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan Berusaha di Tarakan

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, realisasi penggunaan anggaran pada kegiatan fasilitasi perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan perikanan

adalah sebesar Rp81.376.893,- atau setara dengan 13,71% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp1.350.000.000,-

### **3.2.5. Sasaran Strategis 5**

#### **Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan**

#### **IK6. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya**

Dalam rangka memperkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan Indonesia melalui pengembangan peran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pada tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 10/MEN-KP/KB/VIII/2021 dan 17/KB/M.KUKM/VIII/2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Ditjen PDSPKP menindaklanjutinya dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM tentang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bagi koperasi dan UMKM yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2021. Salah satu wujud sinergi program yang dilaksanakan yakni mendorong UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk dapat naik kelas melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha, dari semula berbentuk kelompok usaha pengolah dan pemasar (Poklahsar) menjadi lembaga berbadan hukum koperasi. Diharapkan dengan terbentuknya koperasi maka poklahsar dapat mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan, memiliki kekuatan hukum sehingga dapat mengakses pembiayaan serta meningkatkan posisi tawar dalam bermitra dengan pelaku usaha lain.

Pada tahun 2023 kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan dilakukan kepada lembaga usaha dengan kategori : 1) lembaga usaha non formal (kelompok pengolah dan pemasar) menjadi lembaga usaha formal/berbadan hukum, 2) lembaga usaha berbadan hukum namun perlu dilakukan penguatan kembali karena mendukung program tertentu seperti korporasi nelayan,



klaster daya saing, kampung nelayan maju, kampung budidaya, Inkubator Mina Bisnis dan program lainnya.

**Tabel 3.6. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga Usaha yang Ditingkatkan Kapasitasnya Triwulan I 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET |      | REALISASI |                   |                   |
|----|---|--------|------|-----------|-------------------|-------------------|
|    |   | 2023   | TW I | Capaian   | % thd Target TW I | % thd Target 2022 |
| 6  | Lembaga Usaha Hasil KP yang Ditingkatkan kapasitasnya | 35     | 4    | 4         | 100               | 17,5              |

Target Lembaga usaha yang akan ditingkatkan dan dibina kapasitas kelembagaannya sebanyak 35 lembaga. Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang telah ditingkatkan dan dibina kapasitasnya pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 4 lembaga usaha. Hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 4 lembaga atau tercapai 100%. Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar 70%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023, maka capaian kinerja triwulan I telah mencapai 17,5% dari target yang ditetapkan.

Pada triwulan I, telah dilakukan kegiatan identifikasi kebutuhan lembaga usaha di Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Adapun tujuan dilakukannya identifikasi kebutuhan, untuk memperoleh informasi keinginan/kebutuhan lembaga usaha dalam rangka penguatan tata kelola usaha koperasi, baik manajemen maupun keuangan. Kegiatan fasilitasi peningkatan kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan juga telah dilakukan di Kabupaten Probolinggo, Rembang dan Karanganyar, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung lembaga usaha koperasi dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan uraian diatas, berikut lembaga usaha yang telah ditingkatkan kapasitasnya pada triwulan I Tahun 2023, yaitu:

- 1) Koperasi Bumi Kartini Mina di Jepara;
- 2) Koperasi Mino Mulyo Abadi di Pati;
- 3) Koperasi Agar Makmur Sentosa di Sidoarjo;
- 4) Koperasi Berkah Makmur Bersama di Karawang.

Alokasi anggaran untuk lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp781.000 000,- hingga triwulan I anggaran yang terserap adalah sebesar Rp.60.224.421,- atau setara dengan 20,52% dari total anggaran.

### **IK7. Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya**

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diperlukan strategi pelaksanaan arah kebijakan diantaranya adalah pemberdayaan dan perlindungan usaha, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan usaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan yang diintegrasikan hulu – hilir dalam model sebuah Klaster Daya Saing.

Klaster daya saing ini merupakan kumpulan dari berbagai unit usaha kelautan dan perikanan yang berhubungan secara terintegrasi dari hulu ke hilir dan difasilitasi program pengembangan usaha agar memiliki daya saing SDM, produk, dan perusahaan, serta mampu mengangkat daya saing daerah dan nasional. Klaster daya saing merupakan salah satu model kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk menarik investasi baik PMA maupun PMDN dan berkelanjutan usaha pada usaha sektor kelautan dan perikanan.

Tujuan utama dilaksanakannya Klaster Daya Saing adalah untuk penguatan daya saing di suatu kawasan tertentu dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dan/atau pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

**Tabel 3.7. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Triwulan I 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      | REALISASI |                   |                   |
|----|---|--------|------|-----------|-------------------|-------------------|
|    |   | 2023   | TW I | Capaian   | % thd Target TW I | % thd Target 2022 |
| 7  | Lembaga usaha berbasis klaster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya | 3      | -    | -         | -                 | -                 |

Pada tahun 2023 kegiatan Klaster Daya Saing terdiri dari pembentukan lembaga klaster daya saing dan pengembangan lembaga klaster daya saing. Lembaga klaster daya saing merupakan lembaga usaha yang mampu menggerakkan atau mengelola Kawasan klaster daya saing di lokasi tertentu. Target lembaga usaha yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 3 lembaga. Sampai dengan Triwulan I – 2023, masih dilakukan identifikasi dan pemetaan pelaku usaha untuk membentuk lembaga klaster daya saing,

Oleh sebab itu, belum terdapat realisasi lembaga klaster daya saing yang dibina atau ditingkatkan.

Pada triwulan I, telah dilakukan rapat pembahasan klaster daya saing yang bertujuan untuk menentukan penetapan lokasi, tata cara pengembangan klaster daya saing, dan indikator keberhasilannya. Selain itu juga dibahas terkait bentuk lembaga dan tata cara kerja lembaga yang akan dibentuk. Rapat telah dilaksanakan pada bulan Januari dan Maret 2023.

Alokasi anggaran untuk Lembaga Usaha Berbasis Klaster Daya Saing yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp595.000.000,- hingga triwulan I anggaran yang terserap adalah sebesar Rp1.775.000,- atau setara dengan 0,30% dari total anggaran.

### **3.2.6. Sasaran Strategis 6**

#### **Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha**

#### **IK8. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina**

Penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil KP dilaksanakan dalam rangka mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pembinaan terhadap wirausaha bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya mendukung peningkatan rasio kewirausahaan serta keberlanjutan usaha wirausaha baru dan wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini terlaksananya fasilitas pendampingan dan pembinaan UMKM sektor hasil kelautan dan perikanan.

Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan dibina pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 585 wirausaha. Pada triwulan I tahun 2023 target yang ditetapkan sebanyak 80 UKM/wirausaha, dan telah tercapai sesuai dengan target yaitu sebanyak 80 UKM/Wirausaha. atau setara dengan 100% dari target triwulan I. Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun 2022 yaitu sebesar 96%.



**Tabel 3.8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Wirausaha Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan pada Triwulan I Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET |      | REALISASI    |                   |                   |
|----|---|--------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|    |   | 2023   | TW I | Capaian TW I | % thd Target TW I | % thd Target 2023 |
| 8  | Wirausaha Hasil KP yang Ditumbuhkan dan Dibina (UMKM) | 533    | 80   | 80           | 100               | 15,0              |

Untuk mendukung capaian tersebut, kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha peserta penciptaan wirausaha baru, koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta analisis kebutuhan usaha. Peserta yang telah menjalankan usaha setelah mengikuti rangkaian kegiatan penciptaan wirausaha baru yang berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat (Bandung, Bogor), Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Timur, dilakukan evaluasi keberlanjutan usaha pengolahan produk perikanan, serta pendampingan.
2. Pembinaan dan pendampingan untuk pelaku usaha pengolahan perikanan lainnya telah dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dan pendampingan calon wirausaha, wirausaha dan tenaga kerja di Probolinggo dan rembang. Kegiatan diselenggarakan pada 26 Januari 2023 di Balai Hinggil, Probolinggo dan 16 Februari 2023 di Hotel Pollos, Rembang. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Koordinator Kelompok Kewirausahaan dan Kelembagaan, Direktorat Usaha dan Investasi. Peserta yg hadir sebanyak 35 orang, yang terdiri dari pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan, santri ponpes, perwakilan dinas dan Penyuluh Kabupaten Probolinggo. Adapun narasumber kegiatan berasal dari Kampoeng Timur dan Go UKM Training Center. Bpk. Filsa Budi Ambiya menyampaikan kiat-kiat meningkatkan penjualan produk perikanan dan narasumber dari pemilik Sweet Sundae Bapak Andromeda Sindoro dan Siti Nurkamila yang menyampaikan materi analisa kelayakan usaha dan *Business Model Canvas*.



Gambar 3.10 Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Calon Wirausaha, Wirausaha dan Tenaga Kerja di Kabupaten Probolinggo dan Rembang

3. Bimbingan teknis kewirausahaan dan fasilitasi akses permodalan bersama dengan mitra Komisi IV DPR RI telah dilaksanakan di 8 lokasi meliputi Kalimantan Barat (Kubu Raya), Jawa Tengah (Sragen), Jawa Timur (Madiun, Tulung Agung, Jombang), Nusa Tenggara Barat (Sumbawa, Dompu) dan Lampung ( Lampung Utara).
4. Monitoring dan evaluasi wirausaha dan penjangkaran minat, serta identifikasi kebutuhan usaha. kegiatan ini telah dilaksanakan di Sukabumi tanggal 8 Maret 2023, Bogor tanggal 10 Maret 2023 dan di kabupaten Tangerang selatan pada tanggal 14 maret 2023. Adapun tujuan dilaksanakannya monitoring adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh wirausaha. Berdasarkan hasil monitoring permasalahan yang sering muncul adalah terkait keterbatasan modal termasuk peralatan untuk membangun usaha, penentuan target pasar yang tepat, pemenuhan ijin edar dan legalitas produk serta lemahnya manajemen/pengelolaan usaha. Wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang telah dilakukan pembinaan pada triwulan I tahun 2023 terlampir.



Gambar 3.11 Kegiatan Penjangkaran Minat dan Identifikasi Kebutuhan Usaha di Kota Sukabumi, Bogor dan Tangerang Selatan

Alokasi anggaran untuk wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp6.415.000.000,- hingga triwulan I anggaran yang terserap adalah sebesar Rp487.532.808,- atau setara dengan 7,60% dari total anggaran.

### **IK9. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program**

Direktorat Jenderal PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP untuk mendukung keberlanjutan usaha, dengan melakukan fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pendampingan dalam mengakses kredit program yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, serta pengelolaan keuangan sederhana.

Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit program adalah jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan yang bersumber dari kredit program, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), serta bentuk pembiayaan program lainnya, baik dari lembaga keuangan bank maupun nonbank.

**Tabel 3.9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program Triwulan I Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      | REALISASI    |                  |                   |
|----|--|--------|------|--------------|------------------|-------------------|
|    |  | 2023   | TW I | Capaian TW I | % thdTarget TW I | % thd Target 2023 |
| 9  | UMKM Kelautan Dan Perikanan Yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program (UMKM) | 500    | 50   | 54           | 108              | 10,80             |

Realisasi UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada triwulan I tahun 2023 adalah sebanyak 54 UMKM yang terdiri atas 32 UMKM yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan KUR (bank) dan 22 UMKM yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan Ultra Mikro (nonbank). Fasilitasi pembiayaan berupa sosialisasi, edukasi, dan pendampingan untuk menilai status kelayakan usaha UMKM untuk mengakses pembiayaan, baik ke lembaga keuangan bank ataupun nonbank. Capaian ini setara dengan 108% terhadap target triwulan I tahun 2023 sebanyak 50 UMKM, atau sebesar 10,8% jika dibandingkan dengan target tahun

2023 sebesar 500 UMKM. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, karena formulasi penghitungan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan pelaku usaha KP yang mendapatkan kredit program diantaranya:

1. Terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Diperlukan sosialisasi dan edukasi secara masif tentang skema KUR terbaru 2023.
2. Kenaikan plafon KUR 2023 menjadi Rp450 triliun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun
3. Terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan. Pokja Kredit Program terdiri atas perwakilan eselon I terkait lingkup KKP, perwakilan K/L terkait (Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan) dan lembaga jasa keuangan penyalur kredit program (Bank BRI, BNI, BSI, Mandiri, PT.PNM, dan PT. Pegadaian). Pokja ini sebagai wadah untuk koordinasi dan komunikasi dalam sinergi program pemberdayaan UMKM untuk mendorong peningkatan akses pembiayaan dan keberlanjutan usaha.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan melalui kredit program pada triwulan I tahun 2023 antara lain:

1. Identifikasi Lokasi dan Debitur Potensial Fasilitasi Akses Pembiayaan.  
Kegiatan identifikasi potensi akses pembiayaan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2023. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lokasi akses pembiayaan potensial di Kabupaten target. Adapun kebutuhan informasi yang akan digali adalah sebagai berikut a) Komoditas unggulan; b) Potensi dan sebaran pelaku usaha sektor KP; c) Jenis Usaha yang eksisting; d) Permasalahan serta kendala yang dialami; e) Potensi pembiayaan yang tersedia; dan f) Dokumentasi Lokasi.  
Kegiatan identifikasi diawali dengan rapat koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hasil rapat tersebut



adalah rekomendasi lokasi akses pembiayaan di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Banyumas dan Pemalang. Hasil dari indentifikasi diperoleh bidang usaha kelautan dan perikanan potensial dari 5 (lima) kabupaten tersebut adalah pengolahan ikan dan pergaraman untuk Kabupaten Cirebon, pengolahan ikan asap dan rajungan kupas untuk Kabupaten Cirebon, Pengolahan Bandeng dan ikan asin untuk Kabupaten Banyumas dan Pemalang, dan pengolahan produk lumatan ikan untuk Kabupaten Kulonprogo.

Dari hasil identifikasi, selanjutnya dilakukan analisa dan pembahasan terkait potensi lokasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan oleh kelompok kerja akses permodalan dengan mempertimbangkan jumlah pelaku usaha potensial dan lembaga keuangan yang tersedia dan siap bermitra dengan KKP.



Gambar 3.11 Identifikasi Potensi Pembiayaan di Kab Cirebon



Gambar 3.12 Identifikasi Potensi Pembiayaan di Kab Rembang



Gambar 3.13 Identifikasi Potensi Pembiayaan di Kab Kulonprogo



Gambar 3.14 Identifikasi Potensi Pembiayaan di Kab Banyumas dan Pemalang

Berdasarkan hasil Identifikasi lapang dan analisa kebutuhan, potensi terbesar untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan adalah di Kabupaten Cirebon untuk komoditas usaha pengolahan dan pergaraman dan Kabupaten Rembang untuk komoditas usaha pengolahan pengasapan ikan dan rajungan kupas.

## 2. Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

Dalam rangka meningkatkan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (KUR, Pembiayaan Ultra Mikro, dan skema pembiayaan lainnya) Direktorat Usaha dan Investasi telah menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan pada tanggal 21 Maret 2023, bertempat di Aula PPN Kejawanan yang dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri atas Penyuluh Perikanan dan pelaku usaha KP (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam) di Kabupaten dan Kota Cirebon. Narasumber yang hadir yaitu perwakilan Bank BRI, Bank BJB, dan PT.PNM Cabang Cirebon. Selain edukasi dan sosialisasi tentang skema KUR dan Kredit Ultra Mikro, disediakan juga layanan konsultasi pembiayaan oleh lembaga keuangan.

Permasalahan permodalan di Kabupaten Cirebon diantaranya:

- a. Nelayan mengalami kesulitan akses permodalan usaha antara lain karena tidak adanya agunan/jaminan dan belum adanya koperasi/kelompok yang sehat.
- b. Nelayan di Kabupaten Cirebon masih tersangkut hutang dengan bakul, sehingga hasil tangkapan tidak masuk ke TPI, melainkan dijual kepada pihak bakul selaku pemilik modal.
- c. Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Cirebon berskala mikro dan kecil, membutuhkan permodalan untuk pengembangan usaha.

- d. Anggapan (*stereotype*) perbankan yang kurang tepat tentang sangat tingginya resiko usaha sektor kelautan dan perikanan, baik di bidang budidaya, tangkap dan pengolahan.

Dari hasil kegiatan tersebut terdapat 54 pelaku usaha potensial yang telah mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan berupa sosialisasi dan pendampingan dalam mengakses lembaga pembiayaan dengan potensi nilai pembiayaan sebesar Rp3,37 Miliar.

Alokasi anggaran untuk kegiatan UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp536.000.000,-, hingga triwulan I anggaran yang terserap adalah sebesar Rp72.263.963,- atau setara dengan 13,48% dari total anggaran.

#### **IK10. UMKM yang difasilitasi melalui gerai investasi dan layanan usaha (GISELA)**

Indikator kinerja ini menunjukkan jumlah UMKM Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan layanan Gisela dari TPUKP meliputi: (1) Fasilitasi Pembiayaan, (2) Fasilitasi Perizinan Usaha, (3) Identifikasi Pengembangan Kelembagaan, (4) Identifikasi Kemitraan.

Adapun metode penghitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan oleh TPUKP untuk mengakses pembiayaan pada periode berjalan, baik pendampingan fasilitasi pembiayaan ke lembaga keuangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha, perizinan berusaha yang menjadi salah satu syarat untuk mengakses pembiayaan, penguatan kelembagaan, maupun kemitraan.

**Tabel 3.10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM yang difasilitasi melalui gerai investasi dan layanan usaha (GISELA) pada Triwulan I Tahun 2023**

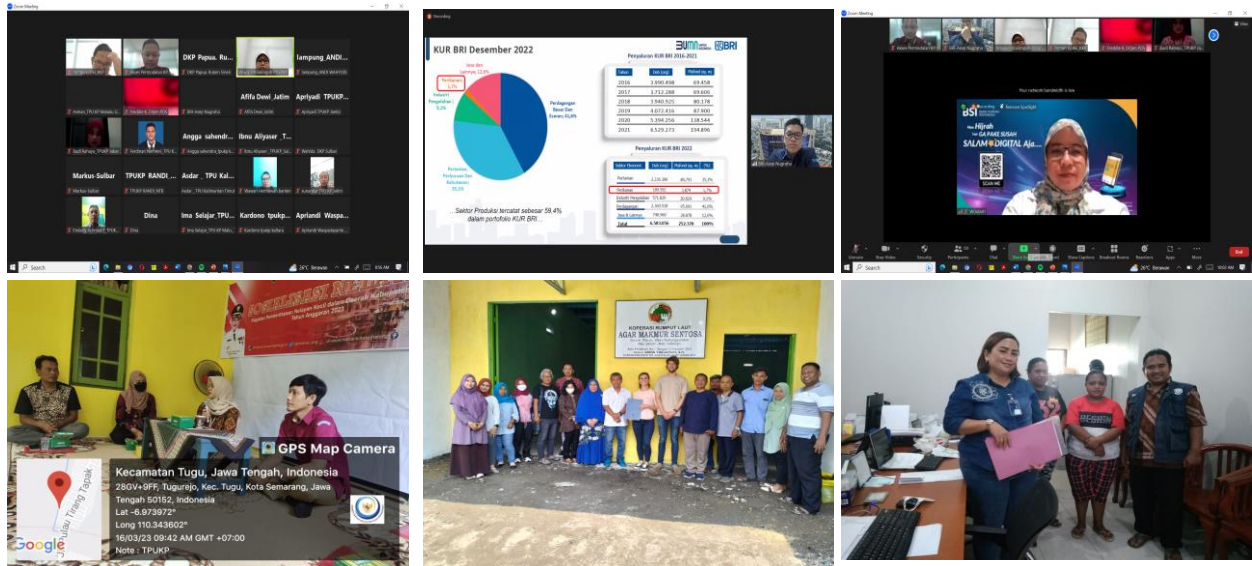
| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      | REALISASI    |                   |                   |
|----|--|--------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|    |  | 2023   | TW I | Capaian TW I | % thd Target TW I | % thd Target 2023 |
| 10 | UMKM yang difasilitasi melalui gerai investasi dan layanan usaha (GISELA) (UMKM) | 2.135  | 100  | 108          | 108               | 5,06              |

Realisasi UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha pada triwulan I tahun 2023 adalah sebanyak 108 UMKM yang terdiri atas 72 UMKM yang mendapatkan pembiayaan dengan realisasi kredit sebesar Rp3,64 milyar dan 36 UMKM pengolahan yang mendapatkan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha). Capaian ini setara dengan 108% terhadap target triwulan I tahun 2023 sebanyak 100 UMKM, atau sebesar 5,06% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 2.135 UMKM. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, karena kegiatan Gisela baru dilaksanakan di pusat pada tahun 2023, dengan penghitungan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Realisasi jumlah UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program, selain jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan (realisasi akad kredit), namun juga mencakup UMKM yang didampingi untuk mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan usaha, perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha), penguatan kelembagaan, maupun kemitraan.

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya indikator kinerja ini diantaranya:

1. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 tertanggal 6 Januari 2023, yang menetapkan 83 orang TPUKP di 75 Kabupaten/Kota yang tersebar 34 Provinsi. Dengan terbitnya Permen KP tersebut, sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2023, TPUKP secara aktif melaksanakan tugas untuk identifikasi potensi dan pendampingan kepada UMKM KP di wilayah kerjanya masing-masing, dan berkoordinasi intensif dengan Dinas KP Provinsi dan Kab/Kota serta penyuluh perikanan.
2. Meningkatkan plafon KUR 2023 menjadi Rp450 Triliun;
3. Terbitnya Permenko bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.





Gambar 3.15 Kegiatan Gerai Investasi dan Layanan Usaha secara *Online dan Offline*

Alokasi anggaran untuk kegiatan UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp2.673.000.000,- hingga triwulan I anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 218.445.000,- atau setara dengan 8,17% dari total anggaran.

### IK11. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir

Fasilitasi kemitraan usaha merupakan kerja sama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk mampu mengembangkan jaringan usahanya melalui kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha menengah besar. Fokus dari fasilitasi kemitraan usaha ini tersebar di seluruh bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.

Capaian ini diperoleh dengan menghitung setiap UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir adalah pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah atau besar yang berminat dan/atau melakukan kemitraan usaha atau pelaku usaha skala mikro atau kecil yang difasilitasi dalam program sertifikasi produksi untuk menunjang kegiatan usaha.

**Tabel 3.11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi (UMKM) pada Triwulan I tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      | REALISASI    |                   |                   |
|----|---|--------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|    |   | 2023   | TW I | Capaian TW I | % thd Target TW I | % thd Target 2023 |
| 11 | UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM) | 53     | 15   | 15           | 100               | 28,30             |

Capaian output UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir hingga Triwulan I tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi telah terfasilitasi 15 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat atau tercapai 100% dari target triwulan I, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 maka telah tercapai sebesar 28,30%.

Kegiatan fasilitasi kemitraan agar pelaku usaha mampu mendapatkan sertifikat PIRT yang tentunya akan mempermudah para pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasarannya ke Retail Modern dan meningkatkan nilai kepercayaan konsumen akan jaminan mutu dan keamanan pangan produk para pelaku usaha. Terfasilitasinya 15 UMKM yang melakukan kemitraan usaha dan investasi hulu hilir di Kabupaten Karawang.

Kegiatan fasilitasi kemitraan yang dilaksanakan pada triwulan I 2023 diantaranya:

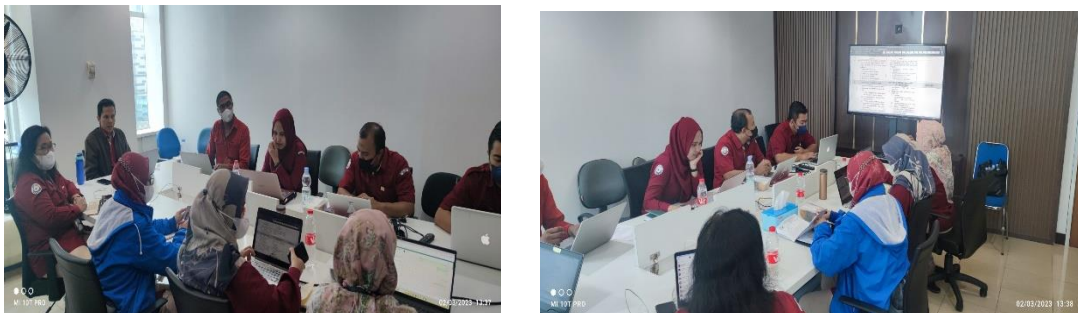
1. Penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dalam rangka Fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan UKM Pengolahan Hasil Perikanan oleh Direktur Usaha dan Investasi pada hari Kamis, 9 Februari 2023 di aula Dinas Perikanan Kabupaten Karawang. Acara dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, dan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, dan diikuti oleh 30 pelaku usaha pengolah dan pemasar produk perikanan yang memenuhi kriteria pangan siap makan dan tahan 7 hari suhu ruang. Kegiatan PKP ini merupakan rangkaian proses penerbitan SPP-IRT sebagai bentuk persyaratan izin edar bagi produk pangan yang dibuat dan dihasilkan di dalam negeri agar teruji layak untuk dipasarkan, terjamin mutu dan keamanannya untuk dikonsumsi, dan dapat diedarkan secara luas. Acara bertujuan untuk memfasilitasi legalitas usaha melalui penerbitan izin edar dalam bentuk Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi pelaku usaha mikro produk perikanan di Kabupaten Karawang.

Syarat untuk mendapatkan SPP-IRT adalah Mengisi Form Permohonan Banduan Fasilitas Sertifikasi SP – PIRT, Fotocopy KTP, Fotocopy NIB, Fotocopy NPWP, Denah Lokasi dan Denah Tempat Produksi, Contoh Label Kemasan, Sample Produk, Stempel / Cap UMKM. Setelah itu pelaku usaha bisa mendaftar ke sistem OSS (*Online Single Submission*) untuk memilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) atau bidang usaha hingga NIB (Nomor Induk Berusaha) terbit. Pilih menu permohonan PB-UMKU dan pilih SPP-IRT, *upload* semua persyaratan. Setelahnya adalah menunggu verifikasi teknis dari Dinas teknis terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kab. Karawang. SPP-IRT dapat langsung di download dari akun OSS yang dimiliki masing-masing pelaku usaha.



Gambar 3.16 kegiatan Fasilitasi sertifikat produksi pangan UKM Pengolahan Hasil Perikanan

2. Direktorat Usaha dan Investasi turut berkontribusi dalam penyusunan usulan revisi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 16 tahun 2019 tentang kemitraan pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di sektor kelautan dan perikanan pada tanggal 2 Maret 2023 di Ruang Rapat Investasi, yang mengundang perwakilan dari Biro Hukum dan Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait.



Gambar 3.17 Kegiatan Rapat Penyusunan usulan revisi peraturan menteri

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan fasilitasi kemitraan usaha antara lain keterbatasan waktu dan personil untuk melaksanakan evaluasi hasil fasilitasi kemitraan, dan proses identifikasi kemitraan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena keterbatasan informasi pelaku usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilaksanakan rapat evaluasi fasilitasi kemitraan secara daring, dan mengikuti pameran atau expo terkait produk – produk olahan umkm dan mengikuti workshop / seminar untuk menambah pengetahuan dan jaringan terkait kemitraan usaha.

Alokasi anggaran untuk UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir pada tahun 2023 yang bersumber dari APBN adalah sebesar Rp804.000.000,- hingga triwulan I anggaran yang terserap adalah sebesar Rp96.978.336,- atau setara dengan 12,06% dari total anggaran.

#### **IK12. Startup millenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi**

*Startup* Milenial yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah *startup* yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, baik berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung, yang dikelola oleh generasi milenial. *Startup* di sektor kelautan dan perikanan bergerak dalam berbagai ragam inovasi, yakni Fintech, Nanobubble, *Autofeeder*, Internet of Things (IoT) Tambak, *E-Commerce*, *Marketplace*, *Portable Pond*, dan *Water Quality Equipment*. Pembinaan *startup* sektor kelautan dan perikanan dalam rangkaian kegiatan Pengembangan *Startup* Millenial sebagian besar akan diarahkan untuk mendukung pembangunan Kampung Budidaya Perikanan, Kampung Nelayan Maju, dan lokasi perikanan strategis, melalui melalui fasilitasi kemitraan, implementasi inovasi teknologi beserta pendampingan teknis peningkatan produksi, akses distribusi/logistik, pemanfaatan fitur fintech, serta pemasaran berbasis teknologi modern untuk pelaku usaha skala UMKM di wilayah tersebut.

Indikator kinerja *startup* milenial adalah dengan melakukan fasilitasi dan pembinaan. Target jumlah pelaku usaha *startup* milenial merupakan UMKM yang terdiri dari *startup* milenial yang bersangkutan dan pelaku usaha mitra *startup*.

**Tabel 3.12 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja *Startup* Milenial yang Difasilitasi dalam rangka Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi**

| NO | INDIKATOR KINERJA       | TARGET |      | REALISASI    |                   |                   |
|----|-------------------------|--------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|    |                         | 2023   | TW I | Capaian TW I | % thd Target TW I | % thd Target 2023 |
| 12 | Startup Milenial (UMKM) | 4      | -    | 1            | 100,00            | 25,00             |

Pada tahun 2023, kegiatan pengembangan *startup* milenial ditargetkan sebanyak 8 UMKM. Capaian kinerja kegiatan ini pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 1 UMKM, atau tercapai 25% dari target tahun 2023. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp35.069.820,- atau 7,01 % dari total anggaran Rp500.000.000,-.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Usaha dan Investasi, Ditjen PDSPKP antara lain:

1. Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi UMKM calon mitra startup milenial di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan koordinasi identifikasi dilaksanakan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. Hasil kegiatan ini adalah terdapat 8 UMKM calon mitra startup milenial.
2. Pelaksanaan pembinaan UMKM melalui startup milenial di Sragen, Jawa Tengah Penyelenggaraan Fasilitasi Startup Perikanan dalam rangka Pengembangan Kampung Perikanan Budidaya Patin di Kabupaten Sragen pada tanggal 17 Maret 2023 bertempat di Hotel Front One Sragen.

Kegiatan ini merupakan wujud dukungan Ditjen PDSPKP terhadap program prioritas KKP yaitu pengembangan kampung perikanan budidaya dengan mendorong pembudidaya ikan untuk bertransformasi ke digitalisasi usaha melalui pemanfaatan produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan rintisan atau startup antara lain eFishery, Banoo, dan Ekosis.

Output dari kegiatan ini antara lain (i) 3 pokdakan siap menggunakan *oxygen generator microbubble* milik Banoo; (ii) 3 pembudidaya siap uji coba penggunaan *auto feeder* milik eFishery; (iii) terdapat 1 UMKM “Mulya” bermitra dengan startup Banoo melalui kerjasama implementasi teknologi *oxygen generator microbubble* pada kolam budidaya ikan patin di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo, Sragen Jawa Tengah.





Gambar 3.18 Kegiatan Fasilitasi Startup Perikanan dalam rangka pengembangan kampung budidaya patin di Sragen

**3.2.7. Sasaran Strategis 7**

**Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan**

**IK13. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan**

Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi didefinisikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dalam lingkup penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada Direktorat Usaha dan Investasi.

Pada tahun 2023, target tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi sebanyak 4.794

orang. Capaian ini belum dapat dihitung pada triwulan I, karena periode pelaporan untuk indikator kinerja ini memiliki periode tahunan.

**Tabel 3.13. Ikhtisar Pencapaian Indikator Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      | REALISASI    |                   |                   |
|----|---|--------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|    |   | 2023   | TW I | Capaian TW I | % thd Target TW I | % thd Target 2023 |
| 13 | Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Usaha dan Investasi | 4.794  | -    | -            | -                 | -                 |

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Usaha dan Investasi untuk mendukung capaian ini adalah sebagai berikut :

1. Perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan;
2. Fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan; dan
3. Fasilitasi dan pembinaan Wirausaha, Gisela, Kemitraan Usaha dan Startup Millennial bagi UMKM KP di lokasi-lokasi prioritas di seluruh Indonesia.

### 3.2.8. Sasaran Strategis 8

**Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

#### **IK14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi**

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK  $\geq 75$ .

**Tabel 3.14. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET 2023 | CAPAIAN 2023 | PERSENTASE TERHADAP TARGET (%) |
|----|---|-------------|--------------|--------------------------------|
| 14 | Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai) | 75          | -            | -                              |

Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2023 ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

Meskipun belum capaian, namun direktorat usaha dan investasi telah melaksanakan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pemenuhan indikator kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai Direktorat Usaha dan Investasi untuk menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal pada periode sebelumnya, melalui rapat koordinasi intensif pada masing-masing area dengan dukungan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK.

**IK15. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bagian SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP. Kegiatan pendukung untuk IKU ini adalah dalam bentuk pengembangan SDMA serta kegiatan monitoring dan evaluasi pada SDMA.

**Tabel 3.15. Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI |                   |
|----|--|--------|-----------|-------------------|
|    |  | 2023   | Capaian   | % thd Target 2023 |
| 15 | Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks) | 83,2   | -         | -                 |

Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 83,2. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini



nilai capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha dan Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023

#### **IK16. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah evaluasi pengukuran kinerja dan revidi laporan kinerja bersama APIP yang pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum dapat dihitung nilai capaiannya pada triwulan berjalan.

**Tabel 3.16 Ikhtisar Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan I Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI |                  |
|----|--|--------|-----------|------------------|
|    |  | 2023   | Capaian   | % thdTarget 2022 |
| 16 | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai) | 80,5   | -         | -                |

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

**IK17. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Ditjen PDSPKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

**Tabel 3.17 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI |                   |
|----|---|--------|-----------|-------------------|
|    |   | 2023   | Capaian   | % thd Target 2022 |
| 17 | Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (persentase) | ≤ 0,5  | -         | -                 |

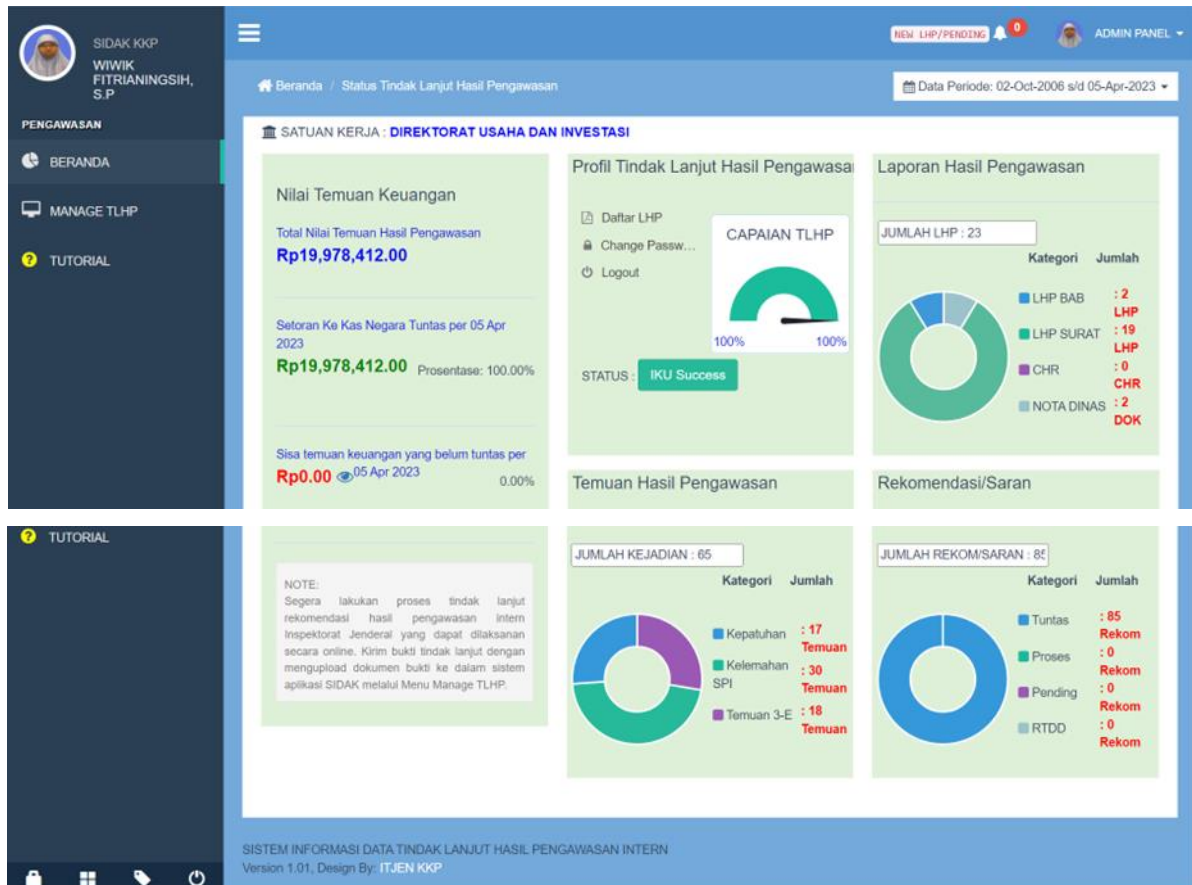
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 80,5. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

**IK18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Pengukuran capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dilakukan setiap triwulan. Berdasarkan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Itjen KKP melalui Aplikasi SIDAK, tindak lanjut hasil pengawasan sampai dengan Triwulan I 2023 mencapai 133,33%, dimana seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Usaha dan Investasi.

**Tabel 3.18. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      | REALISASI    |                   |                   |
|----|--|--------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|    |  | 2023   | TW I | Capaian TW I | % thd Target TW I | % thd Target 2023 |
| 18 | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%) | 75     | 75   | 100          | 133,33            | 133,33            |



**Gambar 3.19 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 6 Januari 2023**

Berdasarkan laporan hasil reviu Inspektorat Jenderal Nomor R.129/ITJ.4/HP.470/VII/2022, tanggal 7 Juli 2022 tentang Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Semester I Tahun 2022 pada Direktorat Usaha dan Investasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), dari 6 rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti secara tuntas dengan capaian 100%. Tindak lanjut yang telah dilakukan meliputi:

1. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara KKP dan PT BRI Nomor: 03/MEN-KP/KB/III/2023 dan Nomor: B.0446-DIR/INS/03/2023 tentang Pemanfaatan

- Jasa dan Layanan Perbankan dalam Peningkatan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan, yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Forum Bisnis dengan tema UMKM Thrive Expo pada tanggal 6 Maret 2023
2. Penetapan Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2023 tertanggal 1 Maret 2023.
  3. Sosialisasi dan edukasi tentang Kredit Usaha Rakyat melalui Pelaksanaan Bimbingan Teknis Akses Pembiayaan di 56 lokasi bersama mitra Komisi IV DPR RI dan kegiatan temu bisnis lainnya.
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan secara berkala, agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
  5. Pemantauan data kredit macet (NPL) KUR sebagai dasar pelaksanaan pembinaan UMKM lebih lanjut.

#### **IK19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi**

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Usaha dan Investasi tahun 2023 ditargetkan sebanyak 1 inovasi. Dalam upaya penerapan inovasi tersebut, pada tahun 2022 Direktorat Usaha dan Investasi telah mengusulkan sistem perizinan berusaha pengolahan ikan dilaksanakan berbasis risiko, post audit untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai standar, dan terintegrasi dalam *Online Single Submission* (OSS), disingkat SI IKAN BERPROTEIN dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD Tahun 2022. Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi akan mengusulkan kembali inovasi pelayanan publik SI IKAN BERPROTEIN untuk berkompetisi agar mendapatkan peringkat 99 terbesar, dan juga mengusulkan kegiatan Gisela sebagai salah satu inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Capaian kinerja ini belum dapat diukur, karena baru akan diperhitungkan pada akhir tahun.

## IK20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Indikator kinerja ini merupakan indikator kedelapan yang ditetapkan untuk mengukur sasaran kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Direktorat Usaha dan Investasi. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah monitoring dan pendampingan keaktifan pengunggahan data dan informasi ke dalam akun Bitrix24, yang pengukurannya dilakukan setiap triwulan. Capaian kinerja persentase unit kerja yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.19 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi pada Triwulan I Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      | REALISASI    |                   |                   |
|----|---|--------|------|--------------|-------------------|-------------------|
|    |   | 2023   | TW I | Capaian TW I | % thd Target TW I | % thd Target 2023 |
| 20 | Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Usaha dan Investasi (%) | 92     | 92   | 100          | 108,69            | 108,69            |

Pada triwulan I tahun 2023, persentase unit kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar mencapai 100% atau setara dengan 108,69% terhadap target triwulan I tahun 2023 sebesar 92%. Capaian tahun ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 100% namun nilai target yang ditetapkan terdapat perbedaan yaitu pada tahun 2022 persentase capaian terhadap target sebesar 116,28% dengan target 86.

Tercapainya indikator kinerja ini disebabkan tingkat keaktifan eselon II, koordinator dan subkoordinator lingkup Direktorat Usaha dan Investasi dalam melakukan pengunggahan data dan informasi ke dalam akun Bitrix24 serta keikutsertaan seluruh pegawai unit kerja lingkup Direktorat Usaha dan Investasi.

**IK21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target persentase realisasi anggaran sebesar 95 Persen. Adapun capaian indikator ini sebagai berikut.

**Tabel 3.20. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI    |                   |
|----|--|--------|--------------|-------------------|
|    |  | 2023   | Capaian TW I | % thd Target 2023 |
| 21 | Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi (%) | 95     | 97,87        | 108,74            |

Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi pada tahun 2023 ditargetkan 95%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

**IK22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 77,5 Persen. Adapun capaian indikator ini sebagai berikut.

**Tabel 3.21 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI    |                   |
|----|--|--------|--------------|-------------------|
|    |  | 2023   | Capaian TW I | % thd Target 2023 |
| 22 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%) | 77,5   | -            | -                 |

Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.



**IK23. Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi**

Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 3.22 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023**

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI    |                   |
|----|--|--------|--------------|-------------------|
|    |  | 2023   | Capaian TW I | % thd Target 2023 |
| 23 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%) | 77,5   | -            | -                 |

Pada tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi menetapkan target Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi sebesar 77,5 Persen. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Usaha dan Investasi Periode Triwulan I Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan misi pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan yang telah ditempuh serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode triwulan I tahun 2023, Direktorat Usaha dan Investasi telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan sesuai target.

Dalam masa *recovery* setelah pandemi Covid-19 berdampak pada adanya perubahan kebijakan pemerintah yang menyesuaikan dengan kondisi global yang mulai kembali seperti sebelum adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan adanya penyesuaian kegiatan pada periode awal di tahun 2023. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat usaha dan investasi terus melaksanakan koordinasi intensif dengan instansi terkait. Diharapkan pada periode berikutnya akan terjadi percepatan pelaksanaan kegiatan, sehingga Indikator Kinerja dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

### 4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Secara umum, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode mendatang antara lain:

1. Dalam penyusunan peluang investasi *ready to offer* untuk mendukung pengembangan bidang hilir di Kalaju Pancer, Banyuwangi perlu dilaksanakan penguatan kelembagaan, koordinasi lebih lanjut antara Pemprov Jatim dan Pemkab

Banyuwangi, sinergitas dengan Direktorat Teknis lain lingkup Ditjen PDSPKP untuk pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan non fisik yang diperlukan yaitu penumbuhan wirausaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, kemitraan usaha, perluasan akses pasar (terutama untuk poklahsar eksisting), bimtek pengolahan untuk istri nelayan, akses distribusi/logistik ke luar Banyuwangi.

2. Perlunya sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait regulasi terbaru tentang perizinan berusaha;
3. Ditjen PDSPKP berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi agar melakukan monitoring, pendampingan, dan koordinasi yang lebih intensif kepada para pelaku usaha, untuk mengevaluasi perkembangan implementasi Kesepakatan Kerjasama kemitraan yang telah dilakukan;
4. Berkoordinasi intensif dengan lembaga perbankan dan non bank serta pemerintah daerah dalam percepatan penyerapan akses permodalan melalui kegiatan fasilitasi akses pembiayaan di Kabupaten Rembang.
5. Mensosialisasikan Permenko bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat kepada tenaga pendamping usaha dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan;
6. Perlu dilaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan startup milenial di lokus Kampung Perikanan Budidaya, sehingga terjalin kemitraan antara startup dengan UMKM, antara lain terkait penerapan inovasi teknologi, akses pembiayaan, perluasan akses pemasaran, dan jual beli sarana prasarana produksi dalam rangka akselerasi peningkatan volume produksi;
7. Melaksanakan pertemuan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi dan peluang investasi, pelayanan dan kemitraan usaha, kelembagaan dan kewirausahaan, serta akses permodalan;

# LAMPIRAN

Lampiran 1.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL Penguatan Daya Saing  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
LAMAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Catur Sarwanto**  
Jabatan : Direktur Usaha dan Investasi

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ishartini**  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

**PIHAK KEDUA,**  
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Ishartini

**PIHAK PERTAMA,**  
Direktur Usaha dan Investasi

Catur Sarwanto

| SASARAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN   | TARGET |
|---|--|--------|
| 1. Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi dan pembiayaan                              | 1. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan investasi (%)                              | 5      |
|   | 2. Persentase peningkatan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merealisasikan pembiayaan kredit program (%)              | 8      |
| 2. Tersedianya peluang investasi yang ready to offer  | 3. Peluang investasi yang ready to offer (Dokumen)   | 4      |
| 3. Terlaksananya promosi usaha dan investasi  | 4. Promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan (Promosi)  | 3      |
| 4. Terlaksananya layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan                                  | 5. Layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan (Layanan)                                     | 1      |
| 5. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lembaga usaha kelautan dan perikanan  | 6. Lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)   | 35     |
|   | 7. Lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)                             | 3      |
| 6. Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan usaha   | 8. Wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina (UMKM)  | 585    |
|   | 9. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program (UMKM)                                      | 500    |
|   | 10. UMKM yang difasilitasi melalui Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA) (UMKM)   | 2.135  |
|   | 11. UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi hulu hilir (UMKM)                            | 84     |
|   | 12. Startup milenial yang difasilitasi dalam rangka kemudahan berusaha dan berinvestasi (UMKM)                               | 8      |
| 7. Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan                                       | 13. Tenaga kerja yang terlibat bidang investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan (Orang)                 | 4.794  |
| 8. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi | 14. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai) | 75     |
|   | 15. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Indeks)   | 83,2   |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN  | TARGET |
|------------------|---|--------|
|                  | 16. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (Nilai)  | 80,5   |
|                  | 17. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)                            | ≤0,5   |
|                  | 18. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%) | 75     |
|                  | 19. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Usaha dan Investasi (Inovasi)   | 1      |
|                  | 20. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)       | 92     |
|                  | 21. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)  | 95     |
|                  | 22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)  | 77,5   |
|                  | 23. Tingkat Kepatuhan BMN di Lingkungan Direktorat Usaha dan Investasi (%)  | 77,5   |

DATA ANGGARAN

| NO  | KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp)         |
|---|--|-----------------------|
| 1.  | Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan | 20.450.000.000        |
| <b>Total Anggaran Direktorat Usaha dan Investasi Tahun 2023</b> |  | <b>20.450.000.000</b> |

Jakarta, Januari 2023

**PIHAK KEDUA,**  
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

**PIHAK PERTAMA,**  
Direktur Usaha dan Investasi



Ishartini



Catur Sarwanto



## Lampiran 2.

Data Dukung Capaian IKU 1 : Promosi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan  
Triwulan I Tahun 2023KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

## MEMORANDUM

Nomor B. 271/DJPDSPKP.1/PDS.410/II/2023

Yth : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  
Dari : Direktur Usaha dan Investasi  
Hal : Laporan Pelaksanaan Promosi Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, Yapen dan Kepulauan Waropen  
Tanggal : 6 Februari 2023

Dalam upaya mendorong peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha KP, serta sebagai rangkaian dari pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih 2023, Ditjen PDS-KKP bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, Yapen, dan Waropen menyelenggarakan Promosi Peluang Investasi Usaha Kelautan dan Perikanan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 bertempat di Gedung Sarinah, Jakarta. Bersama ini dengan hormat kami laporkan hasil kegiatan sebagai berikut:

1. Tujuan kegiatan adalah mempromosikan peluang investasi usaha Kelautan dan perikanan yang *ready to offer* di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi, Yapen dan Waropen.
2. Kegiatan ini menghadirkan Bupati Biak Numfor, Bupati Sarmi, Bupati Yapen; dan Wakil Bupati Kepulauan Waropen yang menawarkan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan di wilayahnya yang siap ditawarkan. Untuk Biak Numfor dan Sarmi menawarkan prospek usaha untuk komoditas tuna, Yapen menawarkan potensi rumput laut dan Waropen menawarkan prospek usaha untuk komoditas kepiting.
3. Peserta yang hadir pada forum promosi kurang lebih 100 orang meliputi atas: i) Asosiasi; ii) Pelaku usaha perikanan; dan iii) Calon investor potensial.
4. Hasil *one on one meeting* diperoleh minat investasi dari PT. Famindo Bahari Indonesia dan KHK Holding, dengan rencana investasi yaitu :
  - a. PT. Famindo Bahari Indonesia menyatakan siap berinvestasi pada pertengahan tahun. Saat ini sedang menyiapkan 30 unit kapal berukuran 120, 130 dan 150 GT dan akan membangun cold storage berkapasitas 2.000 ton di Napdori, Biak Barat. Pimpinan PT. Famindo Bahari Nusantara mengharapkan Pemda Biak dapat memberikan pendampingan dan kemudahan dalam perizinan investasi.
  - b. KHK Holding masih dalam taraf mencari peluang bisnis yang prospektif diantara 4 kabupaten dengan menanyakan kesiapan infrastruktur dasar yang tersedia dalam mendukung investasi.

## 5. Tindak lanjut :

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten terpilih untuk menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang sudah menyatakan minat investasi
- b. Melakukan pendampingan investasi kepada PT. Famindo Bahari Indonesia dan KHK agar dapat merealisasikan investasinya.  
Demikian kami sampaikan, mohon arahan Ibu Dirjen lebih lanjut. Terima kasih.

Tembusan:  
Sekretaris Direktorat Jenderal PDS



Catur Sarwanto

Lampiran 3.

Data Dukung Capaian Triwulan I Tahun 2023 IKU 4: UMKM KP yang Difasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi, dan IKU 3: Institusi yang Difasilitasi Perizinan Usaha Pengolahan

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

**MEMORANDUM**

Nomor: H4/DJPDSPKP.1.3/TJ.140/IV/2023

Yth. : Direktur Usaha dan Investasi  
 Dari : Koordinator Kelompok Pelayanan dan Kemitraan Usaha  
 Hal : Capaian IKU 4: UMKM Kelautan dan Perikanan yang Difasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Triwulan I 2023 dan Capaian IKU 6 : Institusi yang Difasilitasi Perizinan Usaha Pengolahan  
 Lampiran : -  
 Tanggal : 12 April 2023

Bersama ini kami sampaikan Capaian IKU 4 dan 6 Direktorat Usaha dan Investasi Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada pokok surat dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indikator kinerja 4 menunjukkan pelaku usaha skala mikro atau kecil dan menengah atau besar yang berminat dan/atau melakukan kemitraan usaha, dan indikator kinerja 6 menunjukkan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terinformasikan dan terfasilitasi perizinan berusaha sub sector pengolahan.
- Metode penghitungan capaian indikator kinerja 4 adalah dengan menghitung jumlah pelaku usaha skala mikro atau kecil dan menengah atau besar yang berminat melakukan kemitraan usaha dan jumlah pelaku usaha skala menengah atau besar yang melakukan kemitraan dalam rangka pengembangan usaha. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan setiap triwulan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$X = \sum a + \sum b$$

Keterangan :

X = Jumlah UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi

a = Jumlah pelaku usaha mikro atau kecil dan menengah atau besar yang berminat melakukan kemitraan usaha

b = Jumlah pelaku usaha skala menengah atau besar yang melakukan kemitraan dalam rangka pengembangan usaha

- Data pelaku usaha yang berminat dan/atau telah melakukan kemitraan usaha berjumlah 15 orang pada TW1, yaitu melalui fasilitasi kemitraan antara UMKM di Karawang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dalam penerbitan PIRT. Para pelaku usaha tersebut antara lain:

| No | NIK                  | Nama Pelaku Usaha     | Alamat  |
|----|----------------------|-----------------------|---|
| 1. | 3215234307860002     | Yanti                 | Kecemek RT008RW003<br>Desa Bayur Kidul<br>Kecamatan Cilamaya<br>Kulon Kabupaten<br>Karawang                                   |
| 2. | 3215202207740001     | Waryono               | Dusun Muara 02<br>RT008RW002<br>Desa Ciparagejaya<br>Kecamatan Tempuran<br>Kabupaten Karawang                                 |
| 3. | 3215230712640002     | WARIYONO              | Pasirputih<br>RT016RW005<br>Desa Sukajaya<br>Kecamatan Cilamaya<br>Kulon Kabupaten<br>Karawang                                |
| 4. | 3215057004870003     | SULARMI RAMADHANI     | Jl. Penyul Barat<br>RT007RW010<br>Desa Tegalkamulyan<br>Kecamatan Cilacap<br>Selatan Kabupaten<br>Cilacap                     |
| 5. | 3215014905960005     | SRI RAHAYU RIZKI      | Jl. Pepaya Guro I<br>RT004RW011<br>Kelurahan Nagasari<br>Kecamatan Karawang<br>Barat Kabupaten<br>Karawang                    |
| 6. | 3215264501740002     | SRIUTAMI              | Bumi Karawang Permai<br>Blok D7 No 3 RT023 RW<br>006<br>Desa Warungbambu<br>Kecamatan Karawang<br>Timur Kabupaten<br>Karawang |
| 7. | 3215052103890001     | SOMAD                 | Dusun Walahar II<br>RT007RW002<br>Desa Walahar<br>Kecamatan Klari<br>Kabupaten Karawang                                       |
| 8. | 32151542038000<br>04 | RINI MARTYANING DIYAH | Perum Pratama Permai<br>RT009RW 005<br>Desa Tegalwaru<br>Kecamatan Cilamaya<br>Wetan Kabupaten<br>Karawang                    |
| 9. | 3215231407680002     | RAMINOTO              | Pasirputih<br>RT015RW005<br>Desa Sukajaya<br>Kecamatan Cilamaya   |

|    |                  |                       |  |
|----|------------------|-----------------------|--|
|    |                  |                       | Kulon Kabupaten Karawang   |
| 10 | 3215234503770005 | ODAH                  | Krajan RT011RW001<br>Desa Pasirjaya<br>Kecamatan Cilamaya<br>Kulon Kabupaten Karawang                            |
| 11 | 3215234409870002 | NUNUNG NURAENI        | Pasirputih RT019RW 005<br>Desa Sukajaya<br>Kecamatan Cilamaya<br>Kulon Kabupaten Karawang                        |
| 12 | 3215236107930003 | NINING SURNATIN       | Dusun II RT003RW002<br>Desa Sumurgede<br>Kecamatan Cilamaya<br>Kulon Kabupaten Karawang                          |
| 13 | 3215015205750008 | NENI SUHAENI          | Anjun Kanoman RT003RW005<br>Kelurahan Karawang<br>Kulon Kecamatan Karawang Barat<br>Kabupaten Karawang           |
| 14 | 3215260607860003 | MUHAMAD ASHARI RIDWAN | Krajan II RT001RW002<br>Desa Tegalsawah<br>Kecamatan Karawang Timur<br>Kabupaten Karawang                        |
| 15 | 3215066403680002 | MARYORITA             | Perum PDP Blok.A3 / 07 RT009RW009<br>Desa Rengasdengklok Utara<br>Kecamatan Rengasdengklok<br>Kabupaten Karawang |

4. Metode penghitungan capaian indikator kinerja 6 adalah dengan menghitung jumlah pelaku usaha yang memperoleh perizinan berusaha sub sector pengolahan dan jumlah pelaku usaha yang terinformasikan hal-hal terkait perizinan usaha. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan setiap triwulan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$X = \sum a + \sum b$$

Keterangan :

X = Institusi yang difasilitasi perizinan usaha pengolahan

a = Jumlah pelaku usaha yang memperoleh perizinan berusaha sub sector pengolahan

b = Jumlah pelaku usaha yang terinformasikan hal-hal terkait perizinan usaha

5. Selama periode Januari - Maret 2023 telah diterbitkan 10 Sertifikat Standar Bidang pengolahan ikan yang terbagi menjadi 2 kategori, 9 Sertifikat Standar terbit melalui verifikasi, dan 1 Sertifikat Standar terbit otomatis kepada pelaku usaha yang bermohon sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan, yang merupakan revisi dari Permen KP No. 67 Tahun 2018, dan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Standar Produk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor KP dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi komitmen yakni rencana usaha dan standar usaha. Daftar SIUP bidang Pengolahan Ikan yang telah diterbitkan sebagaimana berikut dibawah :

| No | NIB           | Nama Perusahaan              | Status            |
|----|---------------|------------------------------|-------------------|
| 1. | 1401230014687 | PT. First Marine Plant       | Terbit Verifikasi |
| 2. | 1612220049491 | PT.Lampung Bay Seafood       | Terbit Verifikasi |
| 3. | 8120119072991 | PT.Louisiana Far East        | Terbit Verifikasi |
| 4. | 8120012260346 | PT.Bahari Pratama Mandiri    | Terbit Otomatis   |
| 5. | 1253000301289 | PT.Laut Biru Seafood         | Terbit Verifikasi |
| 6. | 9120100760951 | PT.Bluese Seafood Industry   | Terbit Verifikasi |
| 7. | 8120002962402 | PT.Seafood Sumatera Perkasa  | Terbit Verifikasi |
| 8. | 8120307870726 | PT.Centralpertiwi Bahari     | Terbit Verifikasi |
| 9. | 8120013131862 | PT.Sea Six Energy Indonesia  | Terbit Verifikasi |
| 10 | 8120208912576 | PT.Kirana Food International | Terbit Verifikasi |

Demikian kami sampaikan, atas arahan Bapak Direktur lebih lanjut kami mengucapkan terima kasih.



Muhammad Wahidin

Lampiran 4.

Data Dukung Capaian IKU 9: UMKM KP yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Melalui Kredit Program Triwulan I Tahun 2023

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING  
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**MEMORANDUM**

Nomor : 136/DJPDSPKP.1.3/TU.140/IV/2023

Yth. : Direktur Usaha dan Investasi  
 Dari : Koordinator Kelompok Akses Permodalan  
 Hal : Capaian Indikator Kinerja 9: UMKM Kelautan dan Perikanan yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program Triwulan I 2023  
 Lampiran : satu berkas  
 Tanggal : 5 April 2023

Bersama ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja UMKM Kelautan dan Perikanan yang Difasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program Triwulan I Tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indikator kinerja ini menunjukkan jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi dan intermediasi akses pembiayaan yang bersumber dari kredit program, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), serta bentuk pembiayaan program lainnya.
- Adapun metode penghitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan kredit program pada periode berjalan, baik yang bersumber dari lembaga keuangan bank berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), lembaga keuangan non bank berupa pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan skema pembiayaan lainnya, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$N = \sum K + \sum U + \sum L$$

Keterangan :

N = UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program

$\sum K$  : jumlah UMKM yang akan mengakses pembiayaan kredit program KUR

$\sum U$  : jumlah UMKM yang akan mengakses pembiayaan kredit program UMi

$\sum L$  : jumlah UMKM yang akan mengakses pembiayaan kredit program lainnya

- Realisasi UMKM kelautan dan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program pada triwulan I tahun 2023 adalah sebanyak 54 UMKM yang terdiri atas 32 UMKM yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan KUR (bank) dan 22 UMKM yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan Ultra Mikro (nonbank). Fasilitasi pembiayaan berupa sosialisasi, edukasi, dan pendampingan untuk menilai status kelayakan usaha UMKM untuk mengakses pembiayaan, baik ke lembaga keuangan bank ataupun nonbank. Capaian ini setara dengan 108% terhadap target triwulan I tahun 2023 sebanyak 50 UMKM, atau sebesar 10,8% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 500 UMKM. Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, karena formulasi penghitungan indikator kinerja yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

| No           | Fasilitasi Akses Pembiayaan | Target     |           | Realisasi Tw I 2023 | % Terhadap Tw I 2023 | % Terhadap Target 2023 |
|--------------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------------|
|              |                             | 2023       | Tw I      |                     |                      |                        |
| 1            | Bank (KUR)                  | 300        | 30        | 32                  | 106                  | 10,6                   |
| 2            | Nonbank (UMi)               | 200        | 20        | 22                  | 110                  | 11,0                   |
| 3            | Kredit Lainnya              | -          | -         | -                   | -                    | -                      |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>500</b> | <b>50</b> | <b>54</b>           | <b>108</b>           | <b>10,8%</b>           |

- Beberapa faktor yang mendorong tercapainya indikator kinerja ini diantaranya:
  - Terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan. Pokja Kredit Program terdiri atas perwakilan eselon I terkait lingkup KKP, perwakilan K/L terkait (Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan) dan lembaga jasa keuangan penyalur kredit program (Bank BRI, BNI, BSI, Mandiri, PT.PNM, dan PT. Pegadaian). Pokja ini sebagai wadah untuk koordinasi dan komunikasi dalam sinergi program pemberdayaan UMKM untuk mendorong peningkatan akses pembiayaan dan keberlanjutan usaha.
  - Pelaksanaan rapat koordinasi Pokja Kredit Program dalam rangka penyusunan rencana kerja untuk sinergi kegiatan pendampingan UMKM
  - Identifikasi potensi kluster pembiayaan di Kabupaten Rembang, Cirebon, Kulonprogo, Banyumas, Pemalang. Dan hasil identifikasi lapang, ditetapkan dua lokasi potensial untuk pembentukan kluster pembiayaan yaitu Kabupaten Rembang untuk olahan ikan asap dan Kabupaten Rembang untuk sentra ekonomi garam.
  - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan di PPN Kejawan Cirebon, yang diikuti oleh dihadiri 100 peserta yang terdiri atas Penyuluh Perikanan dan pelaku usaha KP (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam) di Kabupaten dan Kota Cirebon. Narasumber yang hadir yaitu perwakilan Bank BRI, Bank BJB, dan PT.PNM Cabang Cirebon. Selain edukasi dan sosialisasi tentang skema KUR dan Kredit Ultra Mikro, disediakan juga layanan konsultasi pembiayaan oleh lembaga keuangan.



Wiwik Fitrianingih

Tembusan:  
 Koordinator Kelompok lingkup Direktorat Usaha dan Investasi



## Lampiran 5.

## Data Dukung Capaian IKU 9: Kelembagaan dan Kewirausahaan Triwulan I Tahun 2023

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL Penguatan Daya Saing Produk**  
**KELAUTAN DAN PERIKANAN**

## MEMORANDUM

Nomor : 143/DJPDSPKP.14/TU.140/IV/2023

Yth. : Direktur Usaha dan Investasi  
 Dari : Koordinator Kelompok Kelembagaan dan Kewirausahaan  
 Hal : Capaian IKU Kelembagaan dan Kewirausahaan Triwulan I Tahun 2023  
 Tanggal : 12 April 2023

Bersama ini kami sampaikan Capaian IKU Kelembagaan dan Kewirausahaan Triwulan I Tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

## 1. Target kinerja Kelompok Kelembagaan dan Kewirausahaan terdiri atas :

- a. 4 lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya
- b. 3 lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya
- c. 80 wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan

## 2. Metode penghitungan capaian indikator kinerja yaitu :

## a. Lembaga Usaha

$$\Sigma n = \Sigma n1 + \Sigma n2$$

Keterangan :

$\Sigma n$  = Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya

$\Sigma n1$  = Jumlah lembaga usaha baru yang difasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan

$\Sigma n2$  = Jumlah lembaga usaha binaan yang difasilitasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan

## b. Lembaga Usaha Berbasis Kluster Daya Saing

$$N = \sum_{i=1}^n X_i$$

Keterangan :

N : Jumlah lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya

X : Lembaga usaha penggerak atau pengelola kawasan kluster daya saing

i : 1,2,...,n

## c. Kewirausahaan

$$\Sigma n = \Sigma n1 + \Sigma n2$$

Keterangan

$\Sigma n$  = Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan

$\Sigma n1$  = Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan dan berminat pada usaha hasil kelautan dan perikanan

$\Sigma n2$  = Jumlah wirausaha kelautan dan perikanan yang dibina

## 3. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 :

a. 4 lembaga usaha (100% dari target) telah ditingkatkan kapasitasnya meliputi a) Koperasi Bumi Kartini Mina Di Jepara, b) Koperasi Mino Mulyo Abadi di Pati, c) Koperasi Agar Makmur Sentosa di Sidoarjo, d) Koperasi Berkah Makmur Bersama di Karawang. Capaian output sesuai target yang telah ditetapkan.

b. Capaian output lembaga usaha berbasis kluster daya saing yang dibina dan ditingkatkan kapasitas pada triwulan I tidak tercapai, dikarenakan masih dilakukan identifikasi dan pemetaan pelaku usaha untuk membentuk kluster daya saing.

c. 80 Wirausaha (100% dari Target) telah ditumbuhkan menjadi wirausaha dan dibina sebagai wirausaha, secara rinci sebagaimana terlampir. Capaian output sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Kegiatan yang dilakukan untuk mendorong capaian IKU Lembaga Usaha yaitu a) kegiatan identifikasi kebutuhan lembaga usaha di Jawa Tengah (Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati), adapun tujuan dilakukannya identifikasi kebutuhan untuk memperoleh informasi keinginan/kebutuhan lembaga usaha yang diperlukan dalam rangka penguatan tata kelola usaha koperasi baik manajemen maupun keuangan b) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan juga telah dilakukan di Probolinggo, Rembang dan Karanganyar, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung lembaga usaha koperasi dalam mengembangkan usahanya.

5. Kegiatan yang telah dilakukan identifikasi dan pemetaan pelaku usaha untuk membentuk lembaga kluster daya saing dan rapat pembahasan kluster daya saing yang bertujuan untuk menentukan penetapan lokasi, tata cara pengembangan kluster daya saing, dan indikator keberhasilannya. Selain itu juga dibahas terkait bentuk lembaga dan tata cara kerja lembaga yang akan dibentuk.

6. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong capaian IKU Kewirausahaan adalah pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha peserta penciptaan wirausaha baru, koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta analisis kebutuhan usaha. Peserta yang telah menjalankan usaha setelah mengikuti rangkaian kegiatan penciptaan wirausaha baru dan dilakukan evaluasi keberlanjutan usaha pengolahan produk perikanan, serta pendampingan yang berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat (Bandung, Bogor), Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Pembinaan dan pendampingan untuk pelaku usaha pengolahan perikanan lainnya telah dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dan pendampingan calon wirausaha, wirausaha dan tenaga kerja di Probolinggo dan Rembang.

Kegiatan sosialisasi kewirausahaan pengembangan usaha budidaya dan pemasaran Red Claw di Kabupaten Bogor dalam rangka penciptaan wirausaha baru di Kabupaten Bogor, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung program prioritas tersebut, khususnya program ke-3 yaitu pembangunan budidaya yang ramah lingkungan di wilayah laut, pesisir dan darat. Kegiatan budidaya akan difokuskan pada produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster, dan rumput laut dan ikan yang bernilai ekonomis tinggi. Kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan dan fasilitasi akses permodalan telah dilaksanakan juga di Kalimantan Barat (Kubu Raya), Jawa Tengah (Sragen), Jawa Timur (Madiun, Tulung Agung, Jombang), Nusa Tenggara Barat (Sumbawa, Dompu) dan Lampung (Lampung Utara). Kegiatan lain yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi wirausaha dan peninjauan minat, serta identifikasi kebutuhan usaha

7. Alokasi anggaran bersumber dari APBN tahun 2023, dimana untuk lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya adalah sebesar Rp. 781.000.000,- dengan realisasi triwulan I sebesar Rp. 160.224.421,- atau setara dengan 20,52%. Sedangkan alokasi anggaran untuk kluster daya saing sebesar Rp. 595.000.000,- dengan realisasi triwulan I sebesar Rp. 1.775.000,- (0,30%). Untuk alokasi anggaran wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina sebesar Rp. 6.415.000.000,- sampai dengan triwulan I anggaran yang terserap untuk wirausaha sebesar Rp. 487.532.808,- atau setara dengan 7,60 % dari total anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Prayudi Budi Utomo

Tembusan:  
 Direktur Jenderal PDS

Lampiran 6.

Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan

| No | Tanggal Pelaksanaan | Lokasi         | Provinsi            | Dokumentasi   |
|----|---------------------|----------------|---------------------|---|
| 1  | 6 Februari 2023     | Kab. Kubu Raya | Kalimantan Barat    |     |
| 2  | 15 Maret 2023       | Sumbawa        | Nusa Tenggara Barat |    |
| 3  | 18 Maret 2023       | Madiun         | Jawa Timur          |   |
| 4  | 18 Maret 2023       | Sragen         | Jawa Tengah         |  |
| 5  | 21 Maret 2023       | Lampung Utara  | Lampung             |   |



Lampiran 7.

Daftar User Sistem Manajemen Pengetahuan Direktorat Usaha dan Investasi triwulan IV Tahun 2022

Sekretariat Dijin PDSPKP

| Dokumen            | Target | Capaian | %   |
|--------------------|--------|---------|-----|
| Perjanjian Kinerja | 1      | 1       | 100 |
| Rencana Aksi       | 1      | 1       | 100 |

| Keaktifan      | Target | Capaian | %   |
|----------------|--------|---------|-----|
| Level 2        | 1      | 1       | 100 |
| Koordinator    | 4      | 4       | 100 |
| Subkoordinator | 12     | 12      | 100 |

| Komponen  | Nilai | Bobot | %  |
|-----------|-------|-------|----|
| Dokumen   | 100   | 20%   | 20 |
| Keaktifan | 100   | 80%   | 80 |

| Hasil Penghitungan TW I |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nilai pada TW I         | Nilai s.d. TW I (Rata-rata) |
| 100                     | 100                         |

\*yang diinput dalam aplikasi kinerjaaku

Direktorat Logistik

| Dokumen            | Target | Capaian | %   |
|--------------------|--------|---------|-----|
| Perjanjian Kinerja | 1      | 1       | 100 |
| Rencana Aksi       | 1      | 1       | 100 |

| Keaktifan      | Target | Capaian | %   |
|----------------|--------|---------|-----|
| Level 2        | 1      | 1       | 100 |
| Koordinator    | 4      | 4       | 100 |
| Subkoordinator | 9      | 9       | 100 |

| Komponen  | Nilai | Bobot | %  |
|-----------|-------|-------|----|
| Dokumen   | 100   | 20%   | 20 |
| Keaktifan | 100   | 80%   | 80 |

| Hasil Penghitungan TW I |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nilai pada TW I         | Nilai s.d. TW I (Rata-rata) |
| 100                     | 100                         |

\*yang diinput dalam aplikasi kinerjaaku

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

| Dokumen            | Target | Capaian | %   |
|--------------------|--------|---------|-----|
| Perjanjian Kinerja | 1      | 1       | 100 |
| Rencana Aksi       | 1      | 1       | 100 |

| Keaktifan      | Target | Capaian | %   |
|----------------|--------|---------|-----|
| Level 2        | 1      | 1       | 100 |
| Koordinator    | 4      | 4       | 100 |
| Subkoordinator | 9      | 9       | 100 |

| Komponen  | Nilai | Bobot | %  |
|-----------|-------|-------|----|
| Dokumen   | 100   | 20%   | 20 |
| Keaktifan | 100   | 80%   | 80 |

| Hasil Penghitungan TW I |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nilai pada TW I         | Nilai s.d. TW I (Rata-rata) |
| 100                     | 100                         |

\*yang diinput dalam aplikasi kinerjaaku

Direktorat Pemasaran

| Dokumen            | Target | Capaian | %   |
|--------------------|--------|---------|-----|
| Perjanjian Kinerja | 1      | 1       | 100 |
| Rencana Aksi       | 1      | 1       | 100 |

| Keaktifan      | Target | Capaian | %   |
|----------------|--------|---------|-----|
| Level 2        | 1      | 1       | 100 |
| Koordinator    | 4      | 4       | 100 |
| Subkoordinator | 9      | 9       | 100 |

| Komponen  | Nilai | Bobot | %  |
|-----------|-------|-------|----|
| Dokumen   | 100   | 20%   | 20 |
| Keaktifan | 100   | 80%   | 80 |

| Hasil Penghitungan TW I |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nilai pada TW I         | Nilai s.d. TW I (Rata-rata) |
| 100                     | 100                         |

\*yang diinput dalam aplikasi kinerjaaku

Direktorat Usaha dan Investasi

| Dokumen            | Target | Capaian | %   |
|--------------------|--------|---------|-----|
| Perjanjian Kinerja | 1      | 1       | 100 |
| Rencana Aksi       | 1      | 1       | 100 |

| Keaktifan      | Target | Capaian | %   |
|----------------|--------|---------|-----|
| Level 2        | 1      | 1       | 100 |
| Koordinator    | 4      | 4       | 100 |
| Subkoordinator | 9      | 9       | 100 |

| Komponen  | Nilai | Bobot | %  |
|-----------|-------|-------|----|
| Dokumen   | 100   | 20%   | 20 |
| Keaktifan | 100   | 80%   | 80 |

| Hasil Penghitungan TW I |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nilai pada TW I         | Nilai s.d. TW I (Rata-rata) |
| 100                     | 100                         |

\*yang diinput dalam aplikasi kinerjaaku

Jakarta, 12 April 2023  
 Penanggung Jawab Indikator Kinerja  
 Subkoordinator Humas



Dena Nur Ambarsari